

**LAPORAN PENELITIAN KOLABORASI
DANA PNBP FIS-UNG TAHUN
ANGGARAN 2022**



**PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU 2019
DI KABUPATEN BOLEMO**

Oleh:

**Asmun W. Wantu, S.Pd, M.Sc/197807122005012004 (Ketua TIM)
Rasid Yunus, S.Pd, M.Pd/198402242008121003 (Anggota)
Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M. A/198205032015041002 (Anggota)
Yuli Adhani, S.Pd, M.Pd/198707022020122011 (Anggota)
Al Amin Sabri/221418016 (Anggota)
Noldiyanto Huo/221418063 (Anggota)
Febriyanti Hasyim/2214180018 (Anggota)**

**JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FIS**

Judul Kegiatan : PERILAKU RASIONAL POLITIK BIROKRASI DALAM PEMILU 2019
DI KABUPATEN BOLEMO

KEPUJUKA PENELITI

Nama Lengkap : Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc
NIDN : 0012077803
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Nomor HP : 081328615360
Email :

ANGGOTA PENELITI (1)

Nama Lengkap : Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., MA
NIDN : 0903058201
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

ANGGOTA PENELITI (2)

Nama Lengkap : Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0024028401
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

ANGGOTA PENELITI (3)

Nama Lengkap : Yuli Adhani, S.Pd., M.Pd.
NIDN :
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Durasi Penelitian Keseluruhan : 6 bulan
Penelitian Tahun Ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan :
- Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -

Diketahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial


(M. Nurcha Njulu, M.Pd)
NIP/NIK. 196705091998032002

Gorontalo, 21 Oktober 2022
Ketua Peneliti,


(Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc)
NIP/NIK. 197807122005012004

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(Dra. Novti Y. Kandowangko, M.P)
NIP/NIK. 196811101993032002



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Urgensi Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1.Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu.....	6
2.2. <i>Road Map</i> Penelitian.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Jenis Penelitian.....	12
3.2. Lokasi Penelitian.....	12
3.3. Data dan Sumber Data	13
3.4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	13
3.5. Teknik Analisis Data.....	13
3.6. Pengecekan Keabsahan Data	14
3.7. Bagan Alir Penelitian.....	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	16
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	16
4.2.Hasil Penelitian	20
4.2.1 Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu.....	20
4.2.2 Faktor Yang Menghambat Perilaku Rasional Birokrasi	23
4.2.2.1 Faktor Keluarga dan Kerabat Dekat	23
4.2.2.2 Faktor Kepala Daerah Sebagai Petahana	27
4.2.2.3 Faktor Jabatan Karir.....	29

4.3.Pembahasan	31
4.3.1 Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu.....	31
4.3.2 Faktor Yang Menghambat Perilaku Rasional Politik Birokrasi Dalam Pemilu	35
4.3.2.1 Faktor Ikatan Keluarga dan Kekerabatan	35
4.3.2.2 Peran Kepala Daerah Sebagai Petahana	38
4.3.2.3 Jabatan Karir	40
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	

RINGKASAN

Permasalahan utama yang dialami reformasi birokrasi di Indonesia hingga saat ini adalah perilaku tidak netralnya birokrasi baik dalam agenda pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Hingga pada tahun 2021 tercatat 2.374 kasus pelanggaran yang diproses dan direkomendasi oleh KASN atas temuan pelanggaran netralitas birokrasi. Disisi lain, melalui semangat reformasi birokrasi melalui merit sistem yang melahirkan berbagai macam regulasi untuk mengatur perilaku birokrasi khususnya dalam rezim Pemilu hingga pada agenda transformasi birokrasi “berahlak” belum berdampak positif bagi perilaku birokrasi. Rujukan atas permasalahan tersebut, sudah tentu membutuhkan perspektif lain dalam melihat dan mereduksi sukarnya perilaku ketidaknetralan dimaksud. Atas hal tersebut maka, perspektif perilaku politik khususnya perilaku politik rasional birokrasi dapat dijadikan sebagai salah satu paradigma yang dianggap mampu dalam memetakan perilaku birokrasi yang tidak netral. Artinya, ketika perilaku politik rasional birokrasi dengan mengedepankan nilai logis dan konsistensinya maka apa yang dicita-citakan oleh merit sistem melalui reformasi birokrasi khususnya netralitas politik birokrasi dalam Pemilu akan tercapai. Berdasarkan pada ruang lingkup masalah yang dimaksud, penelitian ini lebih fokus dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana perilaku rasional birokrasi serta faktor yang menghambatnya dalam pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Adapun yang menjadi metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Kata kunci: *Perilaku Rasional, Birokrasi, Pemilu*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai perilaku birokrasi dalam pemilu telah banyak dilakukan oleh ilmuwan sosial, baik politik dan pemerintahan maupun administrasi publik serta disiplin ilmu sosial lainnya. Terdapat dua kecenderungan yang dapat diidentifikasi yakni netral atau tidak netralnya birokrasi dalam agenda Pemilu. Hampir sebagian besar menemukan bahwa birokrasi kecenderungan tidak netral sejak kemerdekaan hingga saat ini. Sarnawa. (2018) dan Diana (2020) berkesimpulan bahwa mengemukakan Regulasi mengenai netralitas birokrasi (ASN) terjadi sejak masa Orde Lama, namun yang terjadi hingga saat ini birokrasi birokrasi masih terkotak-kotak dalam kelompok partai politik dalam Pemilu maupun Pilkada. Bacaan atas hal tersebut terjadi sealam perodesasi rezim pemerintah yang belum mengalami kemajuan yang signifikan, dimana birokrasi tampaknya sangat melekat pada pengaruh politik,

Kondisi seperti ini terjadi menurut Lay (1998) bahwa Tipe ideal tersebut masih mengisahkan banyak masalah yang berasal dari kecenderungan setiap organisasi untuk mengembangkan pamrih atau kepentingan sendiri. Kecenderungan jabatan bagi birokrasi merupakan tujuan akhir dari karirnya, bukan sebagai sarana dalam mencapai tujuan organisasi. Firnas (2011) dalam konteks Pemilu, perilaku birokrasi akan diuji antara profesionalitas dalam menjunjung tinggi netralitas atau sebagai alat kekuasaan yang bersifat jangka pendek.faktanya banyak pelanggaran oknum birokrat khususnya berkaitan dengan netralitas. Tidak netralnya birokrasi karena paksaan dari atasan, ekspektasi jabatan

dari politisi atau partai yang didukung maupun ikatan emosional oknum birokrat terhadap partai atau politisi serta kelompok birokrasi sebagai target potensial yang selalu dimanfaatkan oleh partai maupun politisi. Hal ini sesuai dengan temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam kurun waktu 2017-2020 terdapat 2.374 kasus pelanggaran netralitas birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada.

Kecenderungan tersebut memiliki kesamaan dengan studi Etzioni dan Halevy (2011) tentang birokrasi dan demokrasi. Menurutnya ketika birokrasi kuat akan melemahkan demokrasi dan menguatnya demokrasi akan melemahkan birokrasi di sisi yang lain. Patokan pada argumentasi tersebut, instrument baik teknis maupun independensi dan perilaku birokrasi akan terpolarisasi atas tuntutan demokratisasi di satu sisi dan tipe ideal rasional birokrasi di sisi yang lain. Logikanya, ketika birokrasi diperhadapkan dengan arena kontestasi demokrasi membuat birokrasi cenderung berpihak dan keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Kondisi seperti ini digambarkan oleh Rakhmawanto (2017) Sampai saat ini kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi di daerah membuat semakin sulitnya mesin birokrasi memberikan pelayanan publik yang profesional.

Fakta lain ditunjukkan lewat Suryanjar (2009) dan Wahyudi (2018) melihat birokrasi cenderung dijadikan sebagai mesin politik dan gelanggang tawar-menawar kepentingan elit lokal melalui relasi patronase dan klientelisme. Selain itu, Mudiarta (2018) menemukan ada beberapa fenomena menyangkut dengan politisasi birokrasi diantaranya menggunakan fasilitas negara, mobilisasi ASN, Kompensasi jabatan, mempolitisir rekrutmen ASN baru, komersialisasi jabatan hingga pada pencopotan jabatan karir. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Edward Aspinal (2019) tentang birokrasi dan kekuasaan di Indonesia sejak Pemilu

2004-2019 melibatkan birokrasi secara terbuka baik politisasi birokrasi, mobilisasi pemilihan, hasrat kekuasaan birokrat serta peran kepala daerah membuat birokrasi harus berpihak pada calon atau partai tertentu.

Merujuk pada temuan kontekstual di atas, pendefenisian terhadap perilaku birokrasi layaknya tidak hanya dilihat dari segi perilaku atau sikap ketidaknetralanya dalam Pemilu, akan tetapi secara substansial menggunakan paradigma perilaku politik untuk mengukur atau menelaah dan memetakan kecenderungan sikap politiknya disaat Pemilu. Dengan paradigma ini, dipandang dapat merekonstruksi pola perilaku birokrasi dalam Pemilu. Netral atau tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu merupakan representasi dari pola perilaku yang dibangun berdasarkan orientasi politiknya. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku politik merupakan hal urgen dalam melihat penyebab ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilu.

Ulasan yang mendasari hal tersebut berangkat dari fenomena dalam kontestasi politik lokal di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo pada khususnya yang memiliki kesamaan dengan temuan yang terjadi di daerah lain. Kemenangan partai politik disetiap daerah yang sering mengalami fluktuasi berdasarkan pada keberadaan kepala daerah sebagai ketua maupun pengurus partai politik merupakan catatan terpenting yang dilihat bahwa kekuasaan lokalitas Gorontalo yang dimiliki oleh Gubernur maupun Walikota dan Bupati dapat merepresentasikan kemenangan partai mereka dalam setiap Pemilu. kondisi seperti ini terjadi sejak Provinsi Gorontalo dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini. Hal ini juga terjadi dalam Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo, semua wilayah pemilihan dimenangkan oleh partainya kepala daerah.

Khusus untuk Kabupaten Boalemo, pemilu 2004 partai Golkar di bawa kepemimpinan Iwan Bokings sebagai Bupati dan ketua DPD II Golkar Kabupaten Boalemo berhasil meraih 15 kursi dari 25 kursi DPRD Kabupaten Boalemo. Pada Pemilu 2009 partai Golkar mengalami goncangan ketika Bupati Iwan Bokings melakukan manuver politik menjadi Ketua DPD I Partai Demokrat, atas manuvernya partai Demokrat keluar sebagai partai pemenang dengan jumlah 7 kursi pada pemilu ditingkat Kabupaten. Sementara itu, Pemilu 2014 Golkar mendominasi DPRD dengan jumlah 8 Kursi dibawah kepemimpinan Bupati Rum Pagau yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Boalemo. Pada Pemilu 2019 PDIP memperoleh 7 kursi di tingkat Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati Darwis Moridu sebagai kader PDIP. Data tersebut menunjukkan ada keterkaitan erat antara kepala daerah dengan kemenangan partai politik pada setiap pemilu di tingkat Kabupaten. Fluktuasi tersebut adalah bagian dari dinamika dan konsekuensi logis terhadap pengendali kekuasaan yang dimotori oleh kepala daerah termasuk mempolitisir atau memobilisasi dukungan birokrasi pada setiap pemilu. Merujuk pada hal tersebut dan temuan sebelumnya, keberadaan birokrasi sebagai faktor penentu kemenangan partai di tingkat lokal khususnya Boalemo layak nya harus di cermati melalui perspektif perilaku politik. Atas dasar inilah. Penile tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo sebagai agenda pemetaan netralitas politik birokrasi di saat Pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang pemikian di atas maka, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.
2. Mengidentifikasi dan memetakan faktor yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

1.4. Urgensi Penelitian

1. Penelitian ini akan memberikan sumbangsi pemikiran bagi UNG terhadap stakeholder di daerah, penyelenggara dan pengawas Pemilu maupun kelompok Ilmuan Sosial yang berkonsentarsi terhadap perilaku birokrasi dalam pemilu untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi melalui merit sistem yang terkendala dengan tidak netralnya birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada
2. Mengidentifikasi dan memetakan perilaku politik birokrasi, lebih khusu dalam mencari formula atau model penguatan perilaku rasional politik birokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada.
3. Mengembangkan model perilaku rasional birokrasi berdasarkan pada kondisi sosio kultural dan budaya masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Boalemo pada umumnya sebagai agenda seting netralitas birokrasi menuju merit sistem dan birokrasi yang BerAKHLAK.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu

Joe Kelly dalam (Thoha, 2019) mengemukakan bahwa perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi yang meliputi bagaimana organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan institusi-institusi yang lebih besar. Artinya, birokrasi sebagai organisasi formal yang memiliki sumber daya melimpah termasuk individual dalam hal ini, ASN sebagai birokrat dalam organisasi birokrasi memiliki pengaruh terhadap individu maupun kelompok pemilih atau ASN yang sudah tentunya memiliki hak untuk menentukan pilihan politik pada saat Pemilu. Pada konteks ini, Thoha (2019) mengemukakan bahwa salah satu bagian terpenting dalam perilaku organisasi adalah pengamatan terhadap pengendalian tingkah laku orang-orang dalam organisasi. Dalam konteks ini kajian perilaku organisasi tidak terlepas dari masalah kekuasaan, kondisi seperti ini tetap terjadi pada semua lini kehidupan organisasi baik organisasi formal negara maupun non formal.

Robbins dan Judge (2015) memperhadapkan suatu logika terbalik bahwa apakah memungkinkan bagi organisasi yang membatasi diri dengan politik. Dalam keadaan sadar akan mengatakan 'ya', namun catatan terpenting dari Robbins & Judge adalah dalam kondisi objektif kondisi seperti ini tidak pernah didapatkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Artinya, point pentingnya adalah tidak ada satupun organisasi baik formal atau nonformal yang terlepas dari

perilaku politik organisasi baik atasan maupun bawahan. Pada konteks ini, Thoha (2019) mengemukakan bahwa penggunaan kekuasaan selalu mengakibatkan perubahan dalam kemungkinan bahwa seseorang atau kelompok akan mengangkat suatu perubahan perilaku yang diinginkan.

Untuk melihat realitas tersebut, Robbins dan Judge (2015) menyebutkan sebagai bagian dari *power tactic* yang ditandai dengan nilai kontekstual empirik individu dalam menerjemahkan kekuasaan yang secara spesifik sesuai dengan kebutuhan. untuk mempengaruhi, distribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Realitasnya, perilaku politik dalam organisasi tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan keberadaan suatu organisasi tidak terlepas dari masalah kekuasaan antara atasan dan bawahan. Tentunya dalam memahami perilaku organisasi baik formal maupun non formal, kekuasaan tidak dapat dihindari. Blau, Meyer (2000), Thoha (2019), Ardana, Mujiati & Sriathi (2009), Robbins dan Judge (2015), Gitosudarmo dan Sudita, (2016), Jones, Bradbury & Bputtiler (2016) dan Fahmi (2018) semuanya memiliki kesimpulan yang sama bahwa organisasi tidak bisa terlepas dari perilaku politik individu maupun kelompok dalam struktur organisasi.

Seara eksplisit, Thoha (2002) mengemukakan bahwa perilaku birokrasi merupakan perpaduan antara karakteristik individu dan karakteristik birokrasi. Karakteristik Individu yang dimaksudkan antara lain kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan. Sementara itu karakteristik birokrasi terdiri atas hirarki, tugas, wewenang tanggung jawab, sistem reward dan sistem control. Berdasarkan pada argumentasi teori tersebut di atas dapat digaris bawahi perilaku organisasi dalam hal ini birokrasi tidak bisa terlepas dari perilaku politik

anggotanya dalam organisasi birokrasi itu sendiri. Dalam konteks Pemilu, perilaku politik birokrasi dapat dipetakan melalui tiga pendekatan diantaranya pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Antunes, Rui (2010) mengemukakan bahwa terdapat tiga mazhab dalam mengidentifikasi perilaku memilih, diantaranya:

Pertama mazhab Columbia atau dikenal dengan pendekatan sosiologis, memiliki indikator yang dapat dilihat melalui kecenderungan subyektifitas pemilih berdasarkan prasyarat status sosial, ekonomi, ras, agama, etnis, jender, ketokohan, organisasi masyarakat dan daerah tempat tinggal. Pendekatan ini, sangat beririsan dengan aspek pengalaman dalam karakteristik individu dan aspek hirarki dan wewenang dalam karakteristik birokrasi. Pemilih atau dalam hal ini birokrasi dalam menggunakan hak pilihnya terpola pada aspek pengalaman sebagai hasil interaksi antara pemilih dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, etnis, agama, maupun organisasi dan lain sebagainya. Hal ini kemudian didukung oleh hirarki dan wewenang dalam struktur birokrasi. Pilihan politik birokrasi pada level ini akan berlandaskan pada garis komando dari pimpinan atau atasannya.

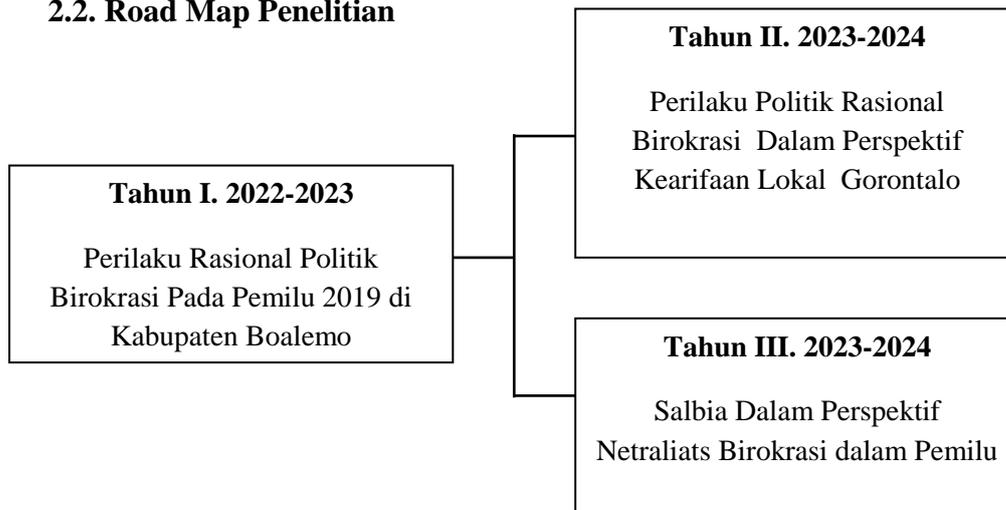
Kedua pendekatan psikologis, yang ditandai dengan kecenderungan subjektifitas pemilih terhadap identifikasi partai, kandidat dan isu. Pola yang dibangun oleh pemilih dalam hal ini birokrasi dalam pilihan politiknya berlandaskan pada kepercayaan mereka terhadap ideologi partai politik, atau pemilih menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan partai politik. Kelompok pemilih ini tidak akan mempertimbangkan aspek lain, baginya pertimbangan partai politik dalam menentukan pilihan adalah hal yang tidak bisa

ditawar. Tentunya proses ini diawali sejak pemilih fanatik terhadap partai tertentu dan birokrasi yang sebelumnya menjadi ASN sebagai kader partai. Selain itu, sistem kontrol sebagai bagian dari karakteristik birokrasi akan memudahkan birokrasi untuk dimobilisir dalam memilih dan mendukung calon atau partai tertentu sebagai partai petahana kepala daerah.

Ketiga Perilaku Rasional, sebagai aliran yang mengkritisi mazhab sebelumnya, indikator yang dapat dilihat dari perilaku pemilih yang rasional antara lain diantaranya pertimbangan logis yang sesuai dengan kebutuhan pemilih, konsistensi terhadap pilihan atas partai politik atau calon berdasarkan pada refleksi masa lalu antara pro dan kontra, serta terdapat inkonsistensi atau tingkat ketidakpastian yang memungkinkan terjadi perbedaan pilihan sebelumnya. Pada level ini, perilaku rasional birokrasi dalam Pemilu akan diperhadapkan pada konsistensi atas preferensi politik yang berlandaskan pada pertimbangan rasional dari diri sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Atas ketiga mazhab tersebut di atas, Pendekatan atau *mazhab rational choice* sangat beririsan dengan tipe ideal rasional birokrasi yang menuntun birokrasi keluar dari politik praktis agar terciptanya independensi atau netralitas birokrasi dalam Pemilu. Aspek kemampuan, kebutuhan, pengharapan, reward, tanggung jawab dan tugas merupakan bagian terpenting dalam karakteristik individu dan birokrasi. Pilihan politik rasional birokrasi tanpa dipengaruhi oleh politik praktis, baik yang dilakukan oleh pejabat birokrasi maupun pejabat politik beserta partai politiknya. Batasan melalui regulasi seperti apa yang dikemukakan di atas dapat terealisasi dengan baik manakala sandaran atau landasan pilihan politik birokrasi pada setiap Pemilu mengedepankan pilihan-pilihan rasional.

2.2. Road Map Penelitian



Tahap I: Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis perilaku rasional politik birokrasi dalam Pemilu di Kabupaten Boalemo. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan memetakan faktor yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi yang membuat kecenderungan birokrasi tidak netral dalam Pemilu 2019. Dengan memetakan dan menganalisis perilaku rasional serta faktor yang menghambat akan dapat menemukan solusi tentang netralitas birokrasi dalam Pemilu di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya.

Tahap II: *Road Map* dalam penelitian tahap kedua ini merupakan tahapan selanjutnya dari penelitian tahap I. Pada tahapan kedua ini lebih fokus pada pemetaan dan identifikasi nilai-nilai kearifan Gorontalo sebagai penguatan perilaku rasional politik birokrasi. Pemetaan tersebut diharapkan sebagai solusi atas penguatan sikap birokrasi menuju netralitas birokrasi dalam Pemilu.

Tahap III: Berangkat dari *road map* I dan II tersebut, tahap ketiga dalam penelitian ini adalah model pemetaan dan penguatan perilaku Salbia sebagai indikator perilaku rasional politik di Provinsi Gorontalo menuju netralitas

birokrasi lokal yang mengedepankan merit sistem dan penguatan transformasi birokrasi yang BerAkhlaq.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Moleong (2007) bahwa metode kualitatif mempermudah peneliti ketika diperhadapkan pada kenyataan jamak, metode ini secara langsung menyajikan hubungan antara peneliti dan responden. Artinya, peneliti dapat menyesuaikan diri dan peka terhadap penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologis, Moleong (2007) mengemukakan pendekatan fenomenologis mengisyaratkan peneliti harus memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam dalam situasi tertentu. Sehubungan dengan judul dan masalah yang diangkat, kondisi natural atau alamiah yang dimaksudkan adalah kondisi riil manusia dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai makhluk politik tidak terlepas dari preferensi politik berdasarkan pada budaya politik. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif, akan dapat mengidentifikasi faktor atau dorongan individu-individu dalam hal ini birokrasi pemerintahan antara rasional atau tidak rasionalnya birokrasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dengan waktu penelitian selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Mei – Agustus 2022.

3.3. Data dan Sumber Data

Data yang bersumber dari penelitian ini berhubungan dengan budaya politik birokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Boalemo. Oleh sebab itu, adapun yang menjadi unit penelitian kualitatif ini meliputi, Sekretaris Daerah (Sekda) perangkat sekretariat daerah lainnya, kepala Dinas atau OPD beserta perangkatnya, Anggota DPRD terpilih, Staf Khusus Bupati bidang Pemerintahan dan Pemilu, Ketua Serta Anggota Tim Koordinasi Kelancaran Pemilu (TKPP) serta Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Sementara itu yang menjadi sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa dokumen laopran, buku, artikel jurnal serta media massa maupun cetak (Harrison Lisa, 2007).

3.4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Lofland dan Lofland (1984) dalam mengemukakan penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah melalui kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain. Atas hal tersebut, teknik dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini mencakup observasi, wawancara serta dokumentasi yang berhubungan dengan budaya politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

3.5. Teknik Analisis Data

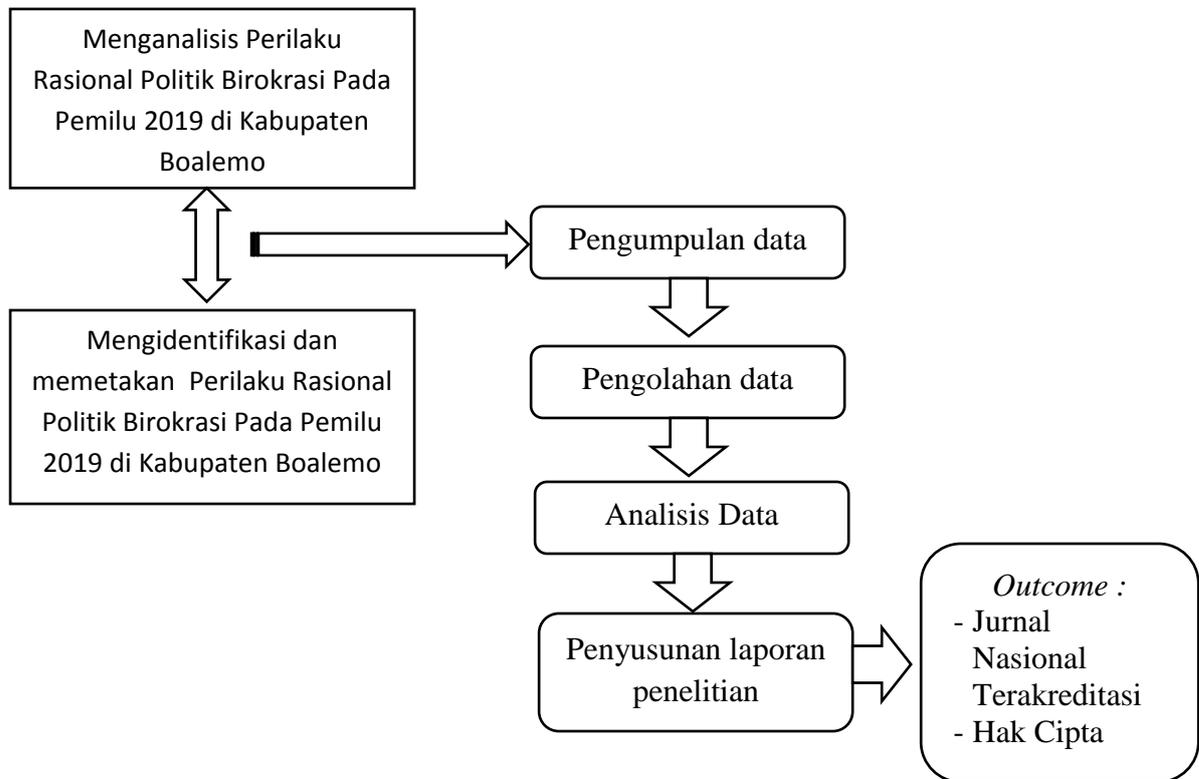
Teknik analisis data oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, dimana analisis dilakukan secara terus menerus atas data yang telah dikumpulkan sebelum menampung data dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992)

bahwa Proses analisis data dalam penelitian dilakukan secara terus menerus serta, bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian langkah yang peneliti dilakukan dalam analisis data mencakup reduksi data yang didapatkan dilapangan akan diuuri dalam bentuk lappran secara lengkap dan terinci. Selanjutnya akan diadakan penyajian data secara keseluruhan agar mendapatkan keutuhan data lapangan. Teknik terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada verivikasi dan interpretasi data yang diperoleh menyangkut dengan budaya politik birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik data yang diperoleh melalui pendekatan penelitian kualitatif. Atas hal tersebut Sugiyono (2013) mengatakan bahwa pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif penting untuk dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah atau tidak. Dengan demikian Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi a) *Credibility* yang terdiri atas perpanjangan pengamatan, kecermatan, Triangilasi dan *Membercheck*; b) *Transferability* melalui validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil; c) *Dependability Reliabilita* dengan menyandingkan isu dan temuan dari temuan peneliti sebelumnya yang sepadan dengan fokus kajian dalam penelitian; dan d) *Confirmability*, pengakuan secara objektif atas temuan yang berasal dari pihak eksternal atas capaian hasil yang diperoleh peneliti..

3.7. Bagan Alir Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Boalemo dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo pasca reformsasi 1998 melalui UU Nomor 50 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 178 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 tertanggal 4 Oktober 1999. Dalam segi administrasi pemerintahan dan demografi wilayah, Kabupaten boalemo terdiri dari tujuh kecamatan, diantaranya Kecamatan Tlamuta, Mananggu, Botumoito, Dulupi, Wonosari, Paguyan dan Kecamatan Paguyaman Pantai yang secara geografis memiliki batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo

Demografi kependudukan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo sebanyak 145.868 jiwa, angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari segi pendidikan masyarakat masih mengalami masalah, dimana sekitar 33,08 % tidak berpendidikan dan 27,27% berpendidikan setara dengan SD. Dilain pihak, isu kemiskinan masih menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten Boalemo, namun demikian dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan 18,57 % pada tahun 2020. Selain itu, sejak

1999 hingga 2022 terdapat beberapa perodesasi kepemimpinan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Periodisasi kepemimpinan Kabupaten Boalemo

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan	Wakil Bupati
1	Dr. Ir. H. Iwan Boking's, MM	1999-2021	Penjabat Bupati	
		2001-2006	Periode Pertama	M.K Dalanggo
	Abubakar Mopangga, SH	2006-2007	Penjabat Bupati	
2	Dr. Ir. H. Iwan Boking's, MM	2007-2012	Periode Kedua	Ir. H. Laode Haimudin, MM
3	Drs. Rum Pagau	2012-2017	Bupati	H. Lahmudin Hambali, S.Sos, M.Si
	Ir. H. Yusuf Giasi	2017	Penjabat Bupati	
4	H. Darwis Moridu, SH	2017-2020		Ir. Anas Jusuf, M.Si
5	Ir. Anas Jusuf, M.Si	2020-2021	Plt Bupati	
		2021-2022	Bupati Definitif	-
	Dr. Hendriwam	2022-Sekarang	Penjabat Bupati	

Sumber : Diolah dari berbagai sumber Penelitian

Selain demografi dan perodesasi kepemimpinan di atas, hal penting yang harus dilihat adalah menyangkut dengan kapasitas sumber daya manusia sebagai kekuatan birokrasi di daerah, untuk melihat gambaran tersebut dapat disimak dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase (%)
	L	P		
SD	12	3	15	0,47
SMP/Sederajat	18	6	24	0,76
SMA/ Sederajat	321	308	629	19,84
Diploma I, II	31	67	98	3,09

Diploma III	93	268	361	11,39
Sarjana, Magister dan Doktor	709	1.334	2.043	66,45
Jumlah	1.184	1.986	3.170	100

Sumber Data : BPS (Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio sex aparatur pemerintahan Kabupaten Boalemo didominasi oleh perempuan dengan jumlah 1.986 jiwa atau 63 % dari total jumlah pegawai, sementara laki-laki berjumlah 1.184 jiwa atau berkisar 37 %. Dari segi pendidikan, pegawai yang memiliki jenjang pendidikan Sarjana magister dan Doktor sebanyak 2.043 orang atau 66,45 % tingkat pendidikan pegawai sudah baik. Sementara itu, untuk Diploma sebanyak 459 orang atau berkisar 14,48 %, SMA sederajat 629 atau 19,84 % serta pegawai dengan tingkat pendidikan SMP dan SD sebanyak 39 orang atau berkisar 1,23% dari totalitas jumlah pegawai. Selanjutnya tabel dibawah ini sebagai gambaran pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

NO	Nama Jabatan	Jumlah
1	Fungsional Tertentu	1.591
2	Fungsional Umum	1.088
3	Struktural	491
5	Eselon IV	332
6	Eselon III	131
7	Eselon II	28
8	Eselon I	0
Jumlah		3.170

Sumber Data : BPS (Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2021)

Tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boalemo berdasarkan jabatan fungsional tertentu berjumlah 1.591 orang atau 50 %, fungsional umum berjumlah 1.088 orang atau 34 %, sementara Struktural berjumlah 491 atau 16% dari totalitas jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boalemo. Sementara itu, untuk jumlah eselon yang terbanyak adalah eselon IV dengan jumlah 332 orang 10,5 %, eselon III 131 atau 4,3 %, eselon II berjumlah 28 orang atau 0,8 % sementara eselon I tidak ada. Untuk mempertegas data jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boalemo, tabel dibawah ini akan menggambarkan PNS berdasarkan pangkat dan golongan lingkup pemerintahan Kabupaten Boalemo.

Hubungannya dengan objek penelitian, fenomena fluktuasi suara dan kemenangan partai politik di Kabupaten Boalemo sangat beririsan dengan keberadaan kepala daerah sebagai pengurus partai politik hingga pada Pemilu 2019 di bawah kepemimpinan Darwis Moridu sebagai Bupati sekaligus sebagai pengurus partai PDIP. Tabel di bawah ini akan menyajikan data perolehan kursi DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019, diantaranya adalah :

Tabel 4. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019

NO	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	PDIP	5	2	7
2	Golkar	3	1	4
3	Demokrat	3	-	3
4	Gerindra	1	2	3
5	PAN	1	-	1
6	Nasdem	2	-	2
7	PKS	1	-	1
8	PPP	1	1	2

9	Hanura	1	-	1
10	Perindo	1	-	1
Jumlah		19	6	25

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo 2021

Perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo menunjukkan legitimasi data atas fluktuasi suara partai pada periodisasi Pemilu dengan keberadaan kepala daerah. ketika bergabungnya Darwis Moridu di partai PDIP setelah terpilih sebagai kepala daerah melalui jalur independen dapat memberikan efek samping bagi keberadaan PDIP di Kabupaten Boalemo. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kemenangan partai politik pada setiap periodisasi Pemilu di Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari keberadaan kepala daerah baik sebagai ketua maupun pengurus atau kader partai.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu

Perilaku rasional mempunyai perbedaan dengan temuan sebelumnya, jika temuan sebelumnya terungkap bahwa perilaku politik birokrasi dalam Pemilu ditentukan oleh pertimbangan aspek pekerjaan, ketokohan kepala daerah, keluarga serta calon kandidat dan partai politik. Maka, perilaku rasional lebih mengedepankan rasionalitas dalam memutuskan pilihan politik yang berdasarkan pada hitungan keuntungan dan kerugian yang diterima ketika keputusan dibuat. Birokrasi atau ASN yang mengutamakan perilaku rasional dalam pemilu cenderung berpikir dan bersikap kritis tanpa intervensi dari pihak luar.

Kecenderungan mereka akan menjaga netralitas atau independensinya di saat Pemilu. Dari beberapa informan yang peneliti temui terdapat beberapa informan dalam menentukan hak atau pilihan politik tidak terjebak pada

pertimbangan lain seperti temuan pada dua pendekatan sebelumnya, seperti apa yang dikemukakan oleh informan berinisial AK selaku Kepala Puskesmas bahwa :

Independensi birokrasi dari berbagai kepentingan politik di daerah adalah hal yang wajib untuk dijalankan. Sebagai ASN yang memegang teguh prinsip independensi. Pada saat yang bersamaan tentu ada himbauan, namun demikian bagi tenaga kesehatan tidak ada instruksi khusus mengenai dukungan dan pilihan politik, bahkan kepala dinas kesehatan pada saat itu selalu menekankan netralitas tenaga kesehatan dalam Pemilu. (wawancara, 14/6/2022)

Hal serupa disampaikan oleh informan yang berinisial ST sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit tani dan nelayan Kabupaten Boalemo bahwa:

“Dalam menentukan hak politik, sebagai warga Negara harus menjalankan kewajiban dalam menentukan pilihan politik. Oleh sebab itu, walaupun suhu politik di Boalemo sangat tinggi, namun bagi saya dalam menentukan pilihan adalah orang yang benar-benar mampu dan mendorong kemajuan program kesehatan di Kabupaten Boalemo tanpa dipengaruhi oleh pihak lain” (Wawancara, 24/06/2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh informan yang berinisial K sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit tani dan nelayan Kabupaten Boalemo menyatakan bahwa :

“Dalam menentukan hak politik, agak kebingungan karena kurang informasi yang didapatkan terkait Pemilu. Akan tetapi kewajiban warga Negara harus dijalani. Jadi, pilihan politik terhadap calon legislatif di Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 berdasarkan pada informasi yang sempat didengar melalui media bahwa visi calon tertentu terhadap isu kesehatan di Kabupaten Boalemo yang membuat dukungan atau pilihan saya kepada calon yang bersangkutan” (Wawancara, 25/06/2022).

Data di atas menunjukkan, dalam menentukan hak pilih merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga Negara yang harus dipenuhi oleh warganya. Namun sebagai ASN yang bertugas melayani masyarakat harus benar-benar fokus tanpa dipengaruhi oleh hal-hal diluar tugas. Kecenderungan yang terjadi adalah pilihan

politik berdasarkan pada nilai rasional tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Pertimbangan mereka berdasarkan pada apa yang diamati dan dilihat serta dipihak mana terdapat kecenderungan program dalam merealisasi kebutuhan tugas dan kerja sebagai ASN yang bergerak dibidang kesehatan dan harus netral dalam pemilu. Seperti halnya dikemukakan oleh informan berinisial SH selaku tenaga kesehatan Puskesmas mengemukakan bahwa:

“Tentunya tenaga kesehatan bersentuhan langsung dengan masyarakat, jika tenaga kesehatan terlibat dalam politik pastinya orang yang didukung akan menang karena memiliki jaringan sampai ke tingkat dusun. Namun hal ini tidak dilakukan, karena melanggar sumpah sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai ASN. Bagi saya melayani masyarakat adalah tugas mulia, jika terlibat dalam hal dukung-mendukung pasti kemuliaan yang dijalankan akan tercoreng” (wawancara 26/06/2022)

Hal serupa disampaikan oleh informan yang berinisial ST sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit tani dan nelayan Kabupaten Boalemo Bahwa:

“Sebagai tenaga kesehatan, kepentingan akan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan prioritas. Selama tahapan hingga pada pelaksanaan Pemilu tidak pernah ada intervensi atau himbauan baik secara langsung atau tidak langsung dari atasan. Tenaga kesehatan tentunya sangat dekat dengan masyarakat, namun tidak ada waktu buat kami untuk membahas masalah politik. Jangankan antara atasan dengan bawahan, antara rekan kerja tidak pernah membahas masalah Pemilu” (Wawancara, 24/06/2022).

Penjelasan yang sama peneliti dapatkan pada informan Berinisial AT sebagai staf kecamatan mengemukakan bahwa:

Sebagai ASN, komitmen atas sumpah sangat penting untuk dijadikan sebagai prinsip. Banyak tekanan serta intervensi yang diterima pada saat itu, namun sebagai ASN dilarang keras untuk terlibat dalam hal dukungan politik kepada calon atau partai tertentu, atas sikap itu saya sempat dimutasi ke kecamatan paguyaman pantai (wawancara, 14/6/2022)

Seperti halnya dikemukakan oleh informan berinisial HE mantan Sekda Kabupaten Boalemo bahwa:

“Jika dilihat dan sesuai dengan pengamatan dan pengalaman pada Pemilu 2019, jabatan fungsional seperti tenaga kesehatan tidak terlibat dalam

politisasi birokrasi, namun fungsional guru dan jajaran structural sangat menonjol pola politisasinya” (Wawancara. 27/6/20212

Data yang didapatkan oleh peneliti melalui beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa ASN yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo berperilaku rasional dalam pemilu 2019. Selain tidak berpihak dalam mendukung calon atau partai tertentu, independensi atau netralitas dijunjung tinggi dan mengedepankan profesionalitas dalam melayani masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

Berangkat dari temuan data tersebut di atas, dapat dipetakan pola perilaku birokrasi pada saat Pemilu di Kabupaten Boalemo. Dimana ASN yang berada di struktural pemerintah daerah, maupun fungsional khususnya tenaga guru sebagian besar terpola pada perilaku sosiologis dan psikologis. Dimana, dalam menentukan pilihan politik atas calon legislatif di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada pertimbangan pekerjaan sebagai ASN, keberadaan kepala daerah dalam hal ini ketokohan, kedekatan dengan partai politik dan calon kandidat serta sebahagian kecil mengedepankan pertimbangan keluarga. Semetara itu, untuk fungsional di bidang kesehatan mengedepankan pilihan atau perilaku rasional dan netral dalam Pemilu tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, serta hanya sebagian kecil ASN yang berada di struktural netral atau independen dalam Pemilu.

4.2.2. Faktor Yang Menghambat Perilaku Rasional Birokrasi

4.2.2.1. Faktor Keluarga dan Kerabat Dekat

Salah satu masalah besar yang melingkupi kecenderungan tidak rasionalnya birokrasi dalam berperilaku melalui Pemilu adalah preferensi politik mereka berdasarkan pada ikatan kekeluargaan dan kerabat dekat. Ikatan tersebut

acap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepala daerah dalam melanggengkan kekuasaannya melalui kemenangan partai politik di saat Pemilu. selain kepala daerah, ikatan tersebut berlandaskan pada iaktan emosional anatra ASN dalam hal ini birokrasi di daerah dengan calon dari partai tertentu diluar partai kepala daerah. Dalam beberapa studi, jejaring keluarga atau kerabat dekat para birokrat atau ASN sangat signifikan dalam memberikan dukungan politik terhadap calon atau partai politik. Informan berinisial SU selaku mantan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo mengemukakan bahwa:

“Terdapat tekanan dan himbauan untuk mengarahkan dukungan pada calon dari PDIP, terdapat simbol atau sandi di dapil satu “surya pro” dan “jilbab merah” di Dapil II. Namun saya tidak memilih calon tersebut, namun ada garansi untuk menggantikan posisi saya dalam memilih calon dari PDIP. Sehingga keluarga diajak untuk memilih wahyu, dan hampir semua keluarga memilih Wahyu. Ada target sepuluh suara untuk calon kandidat. Setiap ASN maupun tenaga kontrak diberikan target, dan harus memenuhi target suara di setiap tempat” (Wawancara, 24/06/2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh informan berinisial ID selaku staf guru di salah satu sekolah Dasar di Kabupaten Boalemo bahwa:

“Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat keluarga dekat saya mencalonkan diri dari partai lain, namun sebagai ASN harus taat terhadap perintah dan himbauan atasan. Tentunya keluarga juga memikirkan nasib saya sebagai ASN, oleh sebab itu dalam menentukan pilihan politik istri dan keluarga dekat memilih calon dari PDIP” (Wawancara, 30/06/2022)..

Temuan data tersebut di atas sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh informan berinisial RK bahwa:

“Selain membangun komunikasi dengan beberapa kepala sekolah yang berada di wilayah paguyaman dan wonosari, hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan anggota keluarga maupun kerabat dekat untuk memilih calon dari PDIP. Disaat yang bersamaan, keluarga saya sebahagian besar berprofesi sebagai petani, pada saat itu program pemerintah Kabupaten lebih besar pada bantuan pupuk, bibit dan lain sebagainya. Hal ini yang memudahkan pekerjaan saya untuk memenuhi arahan pimpinan” (Wawancara, 28/06/2021)..

Data tersebut juga peneliti temukan pada informan lainnya, seperti pengakuan yang disampaikan oleh informan berinisial UJB bahwa:

“Sebagai kepala sekolah tentunya selain melihat dewan guru, juga bertanggung jawab untuk memastikan anggota keluarga maupun kerabat dekat untuk memilih calon tersebut. dengan jalan itu unsur pemenuhan suara di TPS terpenuhi” (Wawancara, 29/06/2022).

Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok birokrasi dalam hal ini ASN menggunakan sistem kekerabatan dalam hal ini anggota keluarga maupun kerabat dekat untuk memilih calon maupun partai PDIP. Artinya, jumlah suara yang sudah ditargetkan pada masing-masing TPS bukan hanya suara ASN, namun dapat dipastikan ada kelipatan suara dari target awal. Disisi lain, keluarga dan kerabat dekat adalah kelompok yang sangat dekat dan ASN. Tentunya dalam memberikan hak politik juga mempertimbangkan aspek posisi dan keberadaan anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN dimata pimpinan maupun kepala daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh informan berinisial AN bahwa:

“Setiap anggota keluarga maupun kerabat dekat pastinya memilih calon dan partai kepala daerah. apalagi ASN yang memegang jabatan tertentu. Supaya tidak dicopot, di non job atau dimutasi, maka dipastikan garansi suara pada partainya Bupati atau calon yang diinginkan. Pada kondisi demikian, pastinya ada kekhawatiran dari keluarga terhadap posisi jabatan maupun tempat kerja bagi anggota keluarganya” (Wawancara, 24/06/2022).

Informasi dari data tersebut di atas, sinkron dengan apa yang dikemukakan oleh RL:

“Dalam menentukan pilihan politik, saya berbeda dengan istri. Artinya istri akan memilih Golkar karena yang bersangkutan sebagai guru SMA yang ada irisan langsung dengan provinsi. Namun, bagi keluarga dekat dan kerabat memilih calon dari partai PDIP karena pertimbangan posisi jabatan pada waktu itu” (Wawancara, 30/06/2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh informan berinisial AM bawah :

“Keberadaan birokrasi apalagi sebagai ASN efektif dalam memobilisasi pemilih melalui jejaring keluarga pada saat Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Secara pribadi saya memilih calon dari partai lain, namun untuk keluarga dipastikan memilih calon seperti apa yang dihimbau oleh atasan. Secara pribadi tidak bisa mengelak, karena keluarga lebih mempertimbangkan keberadaan saya sebagai ASN dari pada aspek lain” (Wawancara, 08/06/2022).

Apa yang dikemukakan oleh AM tersebut di atas memiliki kesamaan dengan informan berinisial SU bahwa:

“Salah satu bentuk mobilisasi yang dilakukan kemarin adalah masing-masing OPD memiliki tanggung jawab terhadap kemenangan calon. Kepala dinas mengontrol staf untuk target suara, sehingganya saya mempunyai tugas untuk mengawal minimal anggota keluarga untuk memilih calon tersebut paling tidak mendapatkan target sepuluh suara” (Wawancara, 24/06/2022).

Berangkat dari temuan dan hasil analisis data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jejaring keluarga dan kerabat dekat efektif dalam mobilisasi birokrasi terhadap calon dan partai politik pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019. Tentunya preferensi politik berdasarkan ikatan keluarga sangat beririsan dengan budaya birokrasi maupun budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan Boalemo pada khususnya yang lebih menekankan pada aspek budaya patronase atau paternalistik. Dengan demikian, jejaring keluarga serta kerabat dekat merupakan strategi mobilisasi yang efektif dalam memobilisasi dukungan pemilih pada saat Pemilu 2019 khususnya pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Artinya, perolehan data dan hasil analisis data lapangan menunjukkan kemenangan PDIP di Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari mesin mobilisasi pemilihan yang dilakukan melalui struktur

dan jejaring birokrasi serta birokrasi memanfaatkan jejaring keluarga dan kerabat dekat dalam memenangkan calon dari partai politik kepala daerah.

4.2.2.2. Faktor Kepala Daerah Sebagai Petahana

Posisi kepala daerah merupakan faktor determinan dalam kemenangan partai politik di daerah. keberadaannya bersentuhan langsung dengan sumber daya birokrasi daerah yang memiliki struktur, hirarki, SDM dan kapasitas anggaran yang siap pakai. Dengan demikian, kemenangan partai politik di setiap daerah tidak terlepas dari peran kepala daerah. di Kabupaten Boalemo misalnya, sejak era 1999 hingga 2019 kemenangan partai politik dalam pemilihan legislatif tidak terlepas dari keberadaan kepala daerah. faktanya, keberadaan sumber daya yang dimaksudkan di atas dan disesuaikan dan temuan dan analisis data lapangan terungkap bahwa kemenangan partai politik pada setiap Pemilu di Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari pengaruh atau peranan kepala daerah. Apa yang dikemukakan di atas berdasarkan pada informasi maupun data yang peneliti dapatkan di lapangan hingga pada tingkat kejenuhan tertentu karena semua informan khususnya birokrasi/ASN mempunyai jawaban yang sama, bahwa dimana kemenangan PDIP di Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 tidak terlepas dari keberadaan Bupati sebagai kader PDIP. Atas hal tersebut informan berinisial HE mengemukakan bahwa

“Kemenangan PDIP pada Pemilu 2018 di Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari pengaruh dan peran seorang Bupati. Dalam hal ini saya akan menyangsikan kalau ada pihak termasuk partai politik yang mengemukakan bahwa kemenangan PDIP tidak terpengaruh dengan Bupati merupakan suatu hal yang keliru” (Wawancara, 27/06/2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh SM bahwa:

“Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengalaman, kemenangan PDIP pada Pemilu 2019 tidak terlepas dari peran Bupati sebagai kader PDIP. Artinya, tanpa Bupati dengan struktur birokrasinya PDIP tidak mungkin memenangkan Pemilu di Kabupaten Boalemo” (Wawancara, 27/06/2022).

Selanjutnya hal yang sama dikemukakan oleh informan berinisial WM selaku anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari fraksi PDIP mengemukakan bahwa:

“Sejak Boalemo terbentuk, siapapun kepala daerahnya, partai politik kepala daerah akan memenangkan Pemilu di tingkat Kabupaten. Mulai dari periode awal Iwan Bookings (alm), Rum Pagau, hingga Darwis Moridu, partai politik kepala daerah selalu memenangkan pertarungan” (Wawancara, 27/06/2022).

Apa yang dikemukakan di atas sama dengan apa yang dikemukakan oleh informan berinisial RL bahwa:

“Mencermati pengaruh antara partai dan kepala daerah serta struktur birokrasi di Kabupaten Boalemo dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang menjadi kepala daerah di Kabupaten ini pastinya partai dimana kepala daerah bernaung akan memenangkan pertarungan, dan hal ini terjadi sejak awal pembentukan Kabupaten Boalemo hingga sekarang ini” (Wawancara, 27/06/2022).

Atas temuan data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan dengan beberapa simpatisan dan pengurus dan anggota DPRD sebagai petahana yang memiliki pemikiran yang sama, diantaranya adalah informan berinisial HM bahwa:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kepala daerah merupakan kunci kemenangan PDIP di Kabupaten Boalemo. Dengan ketambahan tiga kursi adalah bukti konkrit kepala daerah sebagai pengurus partai PDIP. Namun yang perlu dicatat adalah terdapat petahana empat orang yang masih dipilih oleh masyarakat. Artinya selain kepala daerah dengan birokrasi, mesin partai juga berperan aktif dalam kemenangan PDIP” (Wawancara, 27/06/2022).

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, kemenangan PDIP di Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 tidak terlepas dari peranan atau

keberadaan kepala daerah sebagai pengurus partai PDIP. Dari semua informan yang peneliti temui, semuanya memiliki keberagaman atas keyakinan jawaban mereka bahwa, kemenangan PDIP pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo ada bagian dari pengaruh atau peran kepala daerah beserta birokrasi daerah. Namun demikian, terdapat ulasan mendasar tentang petahana anggota DPRD Kabupaten Boalemo

4.2.2.3. Faktor Jabatan Karir

Secara umum, informan mengemukakan bahwa promosi dan penunjukan jabatan karir dalam tahapan dan pasca Pemilu merupakan bagian dari pola politisasi birokrasi pada pemilihan anggota legislatif Kabupaten Boalemo. Untuk menegaskan hal tersebut, HE selaku mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo menyampaikan bahwa:

“Birokrasi adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Namun yang terjadi adalah banyak jabatan yang dipromosikan belum memenuhi syarat namun dipaksakan, hal ini juga sangat berkaitan dengan Pemilu 2019. Artinya ASN yang dianggap loyal dan patuh terhadap kepala daerah dalam merealisasikan kepentingan politiknya di saat Pemilu akan menjadi prioritas, walaupun disisi lain menabrak aturan. Bukan aspek kompetensi yang dilihat tapi dari kepentingan praktis” (Wawancara, 27/06/2022).

Hal yang sama dikemukakan oleh AN selaku mantan Kepala BKD mengemukakan bahwa:

“Ditangannya Bupati terdapat banyak nama yang sudah disediakan untuk mengganti posisi pejabat sebelumnya, dilain sisi nama-nama tersebut tidak memiliki kepantasan atas posisi yang harus diduduki karena masih di bawah pangkat dan golongan. Namun demikian, bagi yang loyal dan taat atas hirarki kekuasaan pastinya akan memanfaatkan kondisi tersebut. Sebagai kepala BKD pastinya mengikuti perintah Bupati walaupun itu salah” (Wawancara, 27/06/2022).

Sesuai dengan apa yang disampaikan di atas, informan berinisial HDL selaku Camat menyampaikan bahwa:

“Jabatan struktural eselon II, III dan IV maupun fungsional tidak terlepas dari pengaruh keterlibatan ASN dalam mendukung PDIP. Promosi dan penunjukan jabatan karir sangat ditentukan oleh loyalitas orang-orang tertentu disaat Pemilu tanpa mempertimbangkan aspek regulasi yang ada. Hal yang kemudian membuat BKD mengalami dilema dalam menjalankan perintah Bupati” (Wawancara, 26/06/2022).

Temuan data tersebut di atas sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh HM ketua Fraksi PDIP bahwa :

“Promosi dan penunjukan jabatan struktural maupun fungsional di Kabupaten Boalemo sangat riskan. Tentunya hal ini sangat berhubungan erat dengan Pemilu 2019. Baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Pemilu. Oknum-oknum pejabat maupun ASN tertentu menunjukkan ketaatan dan loyalitasnya kepada Bupati lewat dukungan politik agar kelak dapat ditunjuk atau dipromosi oleh Bupati untuk menduduki jabatan tertentu” (Wawancara, 26/06/2022).

Mencermati beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa promosi dan penunjukan jabatan karir di lingkungan pemerintahan daerah tidak terlepas dari permasalahan Pemilu sehingga tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui dan berhubungan langsung dengan kepala daerah, diantaranya adalah informan berinisial HH mengemukakan bahwa :

“Promosi dan penunjukan jabatan karir di lingkungan pemerintah daerah pada tahapan maupun setelah Pemilu tidak terlepas dari persoalan dukungan yang bersangkutan terhadap calon legislatif Kabupaten Boalemo. Bagi yang menunjukkan loyalitasnya akan menjadi prioritas dalam menduduki jabatan tertentu” (Wawancara, 27/06/2022).

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh informan berinisial EP selaku staf khusus Bupati mengemukakan bahwa:

“Menjelang tahapan Pemilu, posisi sebagai staf khusus bupati merangkap juru bicara diberikan tugas untuk konsentrasi bidang koordinasi pemerintahan. Dalam tahapan pemilu maupun pasca pemungutan suara, banyak laporan dan masukan yang masuk, akhirnya bupati yang

mempunyai kewenangan bersikap sangat subjektif, bagi pejabat yang loyal langsung dipromosikan, sementara yang tidak loyal atau tidak patut langsung non-job. (Wawancara, 27/06/2022).

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa motif promosi dan penunjukan jabatan karir di Kabupaten Boalemo sangat dipengaruhi oleh loyalitas atau kesetiaan dan kepatuhan birokrasi dalam hal ini ASN terhadap Bupati sebagai kepala daerah. ASN yang tidak loyal terhadap pimpinan akan menerima konsekuensi kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Bagi ASN yang menunjukkan loyalitasnya dalam merealisasikan kepentingan politik kepala daerah akan dipromosikan serta ditunjuk dalam memegang jabatan tertentu. Walaupun di lain sisi, dari segi kepangkatan dan golongan belum memenuhi syarat secara administrasi.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Perilaku Rasional Birokrasi Dalam Pemilu

Perilaku rasional memiliki orientasi yang berbeda dengan pendekatan perilaku sebelumnya. Pertimbangan utama bagi pemilih atau perilaku rasional lebih mengedepankan hitungan untung dan rugi. Ketika memilih, apa keuntungan dan yang diperoleh, ketika tidak memilih apa kerugian yang dialami oleh pemilih. Pemilih golongan ini tidak mempertimbangkan aspek demografi. Kelas sosial, partai politik, calon kandidat seperti apa yang menjadi rujukan dalam kedua pendekatan perilaku di atas. Bagi pemilih pada level ini lebih mempertimbangkan aspek keuntungan atas apa yang didapatkan untuk jangka panjang bila dibandingkan dengan kedua pendekatan sebelumnya.

Konteks Pemilih, berarti semua masyarakat sipil di luar TNI dan Polri memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik termasuk ASN.

Perilaku rasional dalam menentukan hak politik bagi ASN adalah mereka memiliki pertimbangan politik rasional diluar pendekatan perilaku sosiologis dan psikologis. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ASN di Kabupaten Boalemo dalam hal ini pegawai fungsional khususnya tenaga kesehatan berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik.

Antunes, Rui (2010) mengemukakan bahwa pemilih rasional berpedoman pada aspek logis, artinya sebelum menentukan pilihan politik, evaluasi atas berbagai alternatif termasuk isu dan kandidat menjadi prioritas utama dalam menentukan preferensi politik mereka. Sementara selain logis, pemilih akan konsisten atas pilihannya, artinya ketika alternatifnya sama dengan kondisi sebelumnya, pemilih akan mengikuti pilihan politik pada peristiwa yang dialami oleh pemilih pada kondisi yang sebelumnya. Atas hal tersebut, Firmanzah (2012:120) mengemukakan Pemilih Rasional cenderung melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik maupun kandidat sebelumnya dengan hitungan untung rugi. Sebagai ASN sudah tentu memiliki preferensi yang berbeda sesuai dengan pengelompokan pendekatan perilaku seperti apa yang diuraikan di atas. ASN dalam preferensi politik pada pendekatan perilaku ini akan lebih mengutamakan nilai dan sikap berdasarkan pada apa yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

Harusnya, apa yang menjadi ikhtiar Thoha (2002:185) tentang karakteristik birokrasi dari aspek tugas dan tanggung jawab sebagai ASN ditunjukkan lewat sikap dan pilihan politik rasional bagi ASN di Kabupaten Boalemo menjelang Pemilu 2019. Tentunya temuan ini, akan tergambarkan bahwa, hampir secara keseluruhan temuan hasil penelitian mengenai perilaku

birokrasi di setiap Pemilu tidak netral atau tidak independen termasuk tenaga kesehatan sebagai tenaga fungsional birokrasi daerah.

Hubungan dengan temuan tersebut, apa yang menjadi temuan peneliti memiliki nilai konsekuensi berbeda dengan temuan sebelumnya. Dimana dalam menentukan pilihan politik, tenaga fungsional dalam hal ini tenaga kesehatan mengedepankan aspek rasionalitas dalam memberikan dukungan dan pilihan politik. Urgensitas yang mendasari pilihan dan dukungan politik terhadap calon dan partai politik berdasarkan pada aspek visi-misi atau program calon yang berhubungan langsung dengan wilayah kerja tenaga kesehatan. Selama visi-misi dan program kerja yang mengarah pada isu kesehatan di Kabupaten Boalemo akan menjadi dasar utama bagi ASN dalam hal ini tenaga kesehatan dalam merepresentasikan dukungan politik.

Atas hal tersebut, Surbakti (2010:85) mengemukakan bahwa Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi dengan pertimbangan utama adalah apa yang didapat setelah pasca Pemilu. Apa yang dikemukakan tersebut searah dengan Muhammad (2004:137) bahwa pendekatan perilaku rasional melihat pemilih memilih calon atau partai tertentu jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya, prinsip ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lasswell tentang 'siapa mendapatkan apa, kapan dan dimana'.

Untuk mensinkronkan pembahasan mengenai perilaku rasional birokrasi dalam hal ini ASN, sejatinya apa yang menjadi argumentasi Thoha (2002) tentang tugas dan tanggung jawab menjadi prioritas ASN dalam melaksanakan kewajiban sebagai abdi Negara tanpa kooptasi kepentingan diluar dari nilai profesionalitas

sebagai aparatur sipil Negara. Data hasil dan temuan penelitian menunjukkan ASN bidang fungsional dalam menentukan pilihan politik lebih memprioritaskan rasionalitas dalam bersikap terhadap pilihan politik.

Lingkup temuan dan pembahasan mengatasi perilaku rasional ASN dalam menentukan pilihan politik tersebut mencerminkan akan adanya profesionalitas ASN dalam menjunjung tinggi sikap ASN sebagai abdi Negara, apa yang menjadi preferensi politik ASN dalam menentukan pilihan politik berdasarkan pada pertimbangan keputusan politik terhadap apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka dalam kaitannya dengan profesionalitas akan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, terutama menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan.

Berangkat dari ruang lingkup pembahasan di atas, dapat dipahami dari segi urgensi atas hasil dan temuan penelitian bahwa ASN dalam menentukan hak politik dalam memilih calon maupun partai politik adalah bagian dari hak otonom ASN sebagai masyarakat sipil dalam menentukan pilihan politik. Namun demikian, terdapat beberapa pendekatan dalam perilaku politik ASN yang dijadikan sebagai rujukan dalam memetakan perilaku politik birokrasi dalam hal ini keterlibatan ASN dalam menentukan pilihan politik untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019.

Lau, R. Richard (2006) memberikan batasan terhadap ketiga pendekatan perilaku politik di atas, diantaranya, ASN berlandaskan pada pola pendekatan perilaku sosiologis dan psikologis cenderung menutup diri dengan berbagai informasi mengenai Pemilu. Mereka hanya mencari informasi yang berhubungan dengan pola sikap dan perilaku sesuai dengan apa yang menjadi preferensi mereka

dalam Pemilu. Akan tetapi bagi ASN yang rasional akan mempertimbangkan informasi terutama melalui media sosial tentang harapan terhadap isu maupun program yang ditawarkan oleh calon kandidat maupun partai politik.

Atas apa yang menjadi rujukan dan argumentasi pembahasan di atas, rujukan teori yang dikemukakan oleh Thoha (2002:185) tentang perilaku birokrasi mencerminkan karakteristik individu yang terdiri dari kemampuan, kebutuhan, pengalaman, kepercayaan dan pengharapan mendominasi sikap dan perilaku birokrasi dalam menentukan pilihan politik. Disisi lain aspek karakteristik birokrasi yang melingkupi tugas dan tanggung jawab merupakan bagian dari sikap rasionalitas ASN dalam menentukan pilihan politik. sebagai tenaga kesehatan yang berada di jajaran fungsional lebih mengedepankan profesionalitas sebagai abdi Negara yang memegang penuh sumpah jabatan dan profesi bila dibandingkan dengan ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru.

Data atas hasil, temuan dan pembahasan tersebut mengsinkronkan suatu ulasan bahwa, apa yang dikemukakan oleh Beetham (1990) tentang independensi dan netralitas birokrasi menuai data konkrit bahwa, ketidak netralitas birokrasi pada setiap Pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari urgensi perilaku ASN dalam Pemilu.

4.3.2 Faktor Yang Menghambat Perilaku Rasional Politik Birokrasi Dalam Pemilu

4.3.2.1 Faktor Ikatan Keluarga dan Keekerabatan

Sebagai makhluk sosial, sudah tentu ASN memiliki keluarga dan kerabat dekat. Dalam Pemilu, hubungan antara ASN dengan keluarga maupun kerabat dekat mempunyai pengaruh terhadap kemenangan kontestan baik calon maupun

partai politik. Jejaring ini juga memiliki potensi untuk di mobilisir terhadap partai dan calon tertentu. Sebagai keluarga atau kerabat dekat, akan mempertimbangkan keberadaan atau posisi ASN yang bersangkutan,, dengan hubungan emosional yang kuat membuat pertimbangan memilih mereka lebih pada apa yang diserukan oleh ASN.

Dalam kondisi masyarakat tertentu, ASN dianggap sebagai orang yang mempunyai strata lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat dalam hal ini keluarga maupun kerabat dekat ASN merepresentasikan kepentingan politik mereka lewat kelompok ASN. Fenomena ini sangat beralasan, Kantaprawira, (2006:25) melihat kecenderungan budaya masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini telah mereduksi budaya politik dengan berkembangnya patrimonialisme dan neo patrimonialisme. Pendekatan tersebut telah mampu melahirkan pola perilaku individu dan orientasi dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya.

Dengan kata lain, patrimonialisme adalah paham mengenai pola hubungan atau ikatan secara personal antara individu tertentu dengan seorang patron yang memiliki sumber daya lebih, sumber daya tersebut tidak dimiliki oleh anggota sebagai klien dalam ruang tertentu. Kaitannya dengan hal tersebut Edward, Berenschot (2019:30-31) klientelisme politik dapat dilihat pada aspek loyalitas kelompok tertentu dalam kancah politik formal seperti kepada birokrat muda, kaum profesional, dan para pemimpin. Hal ini sesuai dengan hasil temuan penelitian bahwa terdapat sebahagian keluarga dan kerabat dekat ASN

merepresentasikan pilihan politiknya berdasarkan pada posisi ASN sebagai birokrasi di daerah, baik sebagai bawahan maupun pejabat daerah.

Artinya, selain mobilisasi melalui struktur dan jejaring birokrasi, ASN juga menggunakan pola mobilisasi lewat jejaring keluarga dan kerabat dekat. Langkah ini diambil untuk memastikan loyalitas terhadap pimpinan dengan menunjukkan kekuatan dukungannya melalui keluarga dan kerabat dekat disaat Pemilu. Edward, Berenschot (2019:3) mengemukakan bahwa Klientelisme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lainnya menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat secara materil

Dukungan untuk memilih calon dan partai politik pada Pemilu berdasarkan pada pertimbangan kedekatan dengan ASN merupakan bagian dari pola sikap kekerabatan yang melahirkan orientasi masyarakat di saat Pemilu. Apa yang dikemukakan oleh Harjanto (2011:183) tentang Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa keluarga atau kerabat dekat merupakan salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan atau dimobilisir oleh pengendali kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya melalui Pemilu.

Pada konteks ini, reward bukan hanya diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja namun lebih pada kemampuan mereka dalam memobilisasi pemilih di setiap TPS. Pembahasan sebelumnya mengungkapkan bahwa beberapa pejabat OPD yang nonjob karena ditengarai tidak mendukung calon dari PDIP, ukurannya sangat sederhana, dibasis keluarga ASN pada TPS

tertentu yang tidak signifikan dalam perolehan suara akan mengalami ancaman terhadap posisi sebelumnya. Namun ketika basis keluarga pada TPS tertentu memperoleh suara signifikan akan menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah dalam memberikan reward dalam bentuk promosi jabatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat digaris bawahi, dengan memanfaatkan ruang keluarga atau kerabat dekat ASN di pada setiap Pemilu signifikan dalam kemenangan partai politik, khususnya dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Jejaring seperti ini memiliki ikatan emosional yang sangat dekat dengan pemilih dan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strategi kemenangan partai. Fenomena ini dimanfaatkan oleh ASN sebagai bagian dari gerakan mobilisasi politik yang tentunya memiliki harapan dalam menunjukan kepada atasan bahwa yang bersangkutan patut diperhitungkan pada basis masa tertentu dalam merepresentasikan harapan atasan dalam hal ini kepala daerah.

4.3.2.2 Peran Kepala Daerah Sebagai Petahana

Torang (2014:86) mengemukakan Peran dalam artian terminologi merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara itu Soekanto (2013:212) mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang, ketika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peran. Antara peran dan peranan tidak bisa dipisahkan. Setiap manusia memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola hubungan antar sesama. Dengan demikian peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatannya yang diberikan masyarakat kepadanya.

Merujuk pada apa yang dikemukakan di atas maka, peran kepala daerah adalah tingkah kepala daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pimpinan di daerah Kabupaten berdasarkan pola relasi antara kepala daerah dengan birokrat dan masyarakat di daerah. Peranan yang dijalankan tersebut terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan atau merugikan diantara kedua belah pihak. Hubungannya dengan objek penelitian, peran kepala daerah dalam pemenangan partai PDIP di Kabupaten Boalemo dianggap sangat efektif.

Hampir secara keseluruhan daerah di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu dimenangkan oleh partainya kepala daerah. Khusus untuk Provinsi Gorontalo seperti yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, partai pemenang Pemilu dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota adalah partainya kepala daerah. Khusus untuk Kabupaten Boalemo sejak dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004-2019 partai politik di bawah naungan kepala daerah memenangkan Pemilu di tingkat Kabupaten.

Temuan Edward, Berenschot (2019:280) mengemukakan bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang membuat partai kepala daerah memiliki keuntungan atau menang dalam setiap Pemilu. Diantaranya a) dukungan aparat birokrasi. ASN mendukung partainya kepala daerah demi mengamankan pekerjaan mereka. b) Kepala Daerah memiliki kontrol atas sumber daya negara, langkah kreatif untuk mengarahkan anggaran serta manfaat lainnya kepada para pendukung melalui bantuan sosial hingga proyek infrastruktur. c) menggunakan program pemerintah untuk mempertahankan visibilitas publik melalui iklan dan spanduk tentang keberhasilan program pemerintah daerah.

Atas hal tersebut, peran kepala daerah dalam Pemilu baik yang berhubungan dengan dukungan ASN, kontrol terhadap sumber daya pemerintahan dan visibilitas publik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kemenangan PDIP di Kabupaten Boalemo. Atas kewenangan penuh yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban jika dikelola dan dimanfaatkan serta distribusi sesuai dengan sasaran penerima program maka ASN maupun masyarakat akan memberikan dukungan secara etis bagi kepentingan kepala daerah dan partainya pada saat pemilu. Khususnya Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo, persoalan visibilitas publik tidak besar pengaruhnya terhadap preferensi politik birokrasi atau ASN.

4.3.2.3 Jabatan Karir

Farazmand (2009:9) mengemukakan terdapat lima perspektif yang menjelaskan politik birokrasi dan berimplikasi pada demokrasi, politik dan administrasi. Diantara perspektif tersebut terdapat politisasi birokrasi, dimana birokratisasi terdapat nilai politis dan fenomenal, sementara politisasi adalah proses ideologis dalam indoktrinasi birokrasi. Birokrasi pada posisi ini harus menyesuaikan, mematuhi apa yang menjadi harapan pejabat politik. Ketika terjadi penolakan akan berkonsekuensi terhadap kehilangan pekerjaan dan pendapatan, penurunan pangkat, pembunuhan karakter, pengucilan, dan bahkan ancaman keamanan.

Apa yang jelaskan tersebut di atas sama halnya dengan birokrasi di Indonesia. Thoha (2016:170) mengemukakan sejarah birokrasi Indonesia berkesimpulan bahwa netralitas birokrasi belum terwujud hingga saat ini. Pendapat tersebut beririsan dengan apa yang menjadi temuan Edward &

Berenschot (2019:263) bahwa sejak penyelenggaraan pemilihan langsung 2004-2019 di Indonesia, keterlibatan birokrasi dalam Pemilu sangat sulit untuk dihindari. Birokrasi dalam hal ini ASN tetap berpihak terhadap kekuasaan politik.

Apa yang menjadi rujukan di atas sama seperti temuan peneliti. Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo politisasi birokrasi sangat terasa bagi ASN mulai dari pejabat hingga staf administrasi. Politisasi birokrasi yang dilakukan melalui jejaring birokrasi struktural mulai dari Bupati, Kepala OPD, Camat hingga perangkat desa. sementara untuk jejaring fungsional melalui Kepala dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan dewan Guru. Kelompok ini menjadi garda terdepan dalam memenangkan calon dan partai PDIP. Motif keterlibatan dalam Pemilu memiliki orientasi yang berbeda, diantaranya :

Pertama Politisasi lewat Promosi atau Penunjukan Jabatan Karir, untuk mencari posisi tertentu dalam jabatan birokrasi, ASN menunjukkan loyalitas dan ketaatannya terhadap himbauan kepala daerah dengan cara menunjukkan dukungan politik terhadap calon dan partai yang diinginkan oleh Kepala daerah. Promosi dan penunjukan jabatan karir sebahagian besar posisi yang diisi belum memenuhi kualifikasi kepangkatan. Artinya, promosi dan penunjukan jabatan karir bukan berdasarkan pada aturan yang berlaku, namun lebih pada penilaian subjektif kepala daerah disaat tahapan pelaksanaan Pemilu.

Siagian (2002:169) mengemukakan bahwa promosi jabatan adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hirarki jabatannya lebih tinggi dan penghasilannya lebih besar. Merujuk pada apa yang dikemukakan tersebut, layaknya promosi jabatan atau penunjukan jabatan karir dengan

penempatan ASN yang memiliki posisi tanggung jawab yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Hasil dan temuan lapangan menunjukkan, promosi jabatan struktural maupun fungsional di Kabupaten Boalemo lebih mempertimbangkan pertimbangan politik praktis di saat Pemilu bila dibanding dengan ketetapan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Temuan tersebut beririsan dengan apa yang menjadi temuan Edward & Berenschot (2019:263) mengemukakan bahwa keterlibatan ASN dalam Pemilu semata-mata memperjuangkan Kepentingan pejabat politik dan pejabat birokrasi. Politisasi birokrasi tersebut telah memetakan posisi pejabat senior sekitar 80 % penunjukan berlandaskan pada dukungan terhadap calon dan partai politik selama tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam kondisi tersebut, perilaku birokrasi akan diperhadapkan dengan dilema antara posisi dan jabatan serta mengikuti naluri yang berdasarkan pada regulasi tentang independensi dalam Pemilu. Namun demikian, temuan penelitian sangat beririsan dengan temuan Edward & Berenschot (2019) tentang politisasi birokrasi melalui promosi atau penunjukan jabatan karir.

Atas temuan tersebut, tentunya apa yang dilakukan tidak memiliki kualifikasi dengan regulasi atau peraturan mengenai promosi atau penunjukan jabatan karir. Untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan edaran Nomor K.26-30/v.108-6/9 tentang Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Edaran tersebut sebagai petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam melakukan promosi atas jabatan ASN di daerah. Setiap ASN mempunyai hak yang sama untuk

dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan berlandaskan pada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja ASN pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

Pertimbangan lebih lanjut sebagai acuan dari edaran tersebut adalah promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada instansi pemerintah. Ketentuan lain yang dapat dilihat adalah Permendagri No. 58 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 5 Tahun 2019 yang berlandaskan pada edaran Nomor K.26-30/v .108-6/9 menekankan bahwa promosi atau penunjukan jabatan karir terhadap ASN yang menduduki jabatan struktural maupaun fungsional sekurang-kurangnya dua tahun dan selebihnya lima tahun untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan awal.

Mencermati ketentuan tersebut, promosi dan penunjukan jabatan karir lingkup pemerintah daerah Boalemo pada tahun 2019 masih jauh dari ketentuan yang berlaku. Kepantasan bagi peneliti dalam hal perolehan data tentunya dibatasi oleh berbagai hambatan, dengan demikian, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan pada hal tersebut. temuan Kamulli (2020:87) dijadikan sebagai sumber data dalam melihat promosi dan penunjukan jabatan karir sebagai salah satu bentuk politisasi birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Berikut adalah daftar nama

Pegawai Negeri Sipil di Promosi dan Penunjukan Jabatan karir serta Pencopotan jabatan karir di wilayah kerja Kabupaten Boalemo:

Tabel 5. Promosi, penunjukan serta pencopotan jabatan karir

NO	Nama	Jabatan Sebelumnya	Mutasi/ Nonjob
1	Ibu Fatlina Pakaya S.Pd.	Bagian Humas selama 4 bulan, (Januari-April 2018) bulan Mei Nonjob	Bagian Sekretaris Satpol PP selama bulan (agustus-september 2018) staf inspektorat Kabupaten Boalemo selama bulan (November-Desember) bagian penanggulangan Bencana alam Bulan Agustus - Oktober Asisten 1 bupati Boalemo bulan Desember hingga saat ini Sekretaris Dinas sosial
2	Yakob Akuba SE	Kadis Penanaman Modal dan Sumber Daya Mineral	Kepala dinas perpustakaan (6 bulan) Kepala dinas pariwisata (3 bulan) Staf ahli bupati bidang hukum dan pemerintahan Asisten 3 bagian Umum
3	Sutriyani Lumala ST.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan pemukiman Perhubungan dan Pertanahan	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Boalemo. kepala Kesatuan bangsa dan politik. Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja
4	Iyam Bareki S.Kom.	Sekretaris Bappeda (januari-februari 2018)	Dinas Kelautan dan perikanan (April- Juli) staf Dinas sosial dan PMD (Agustus-oktober 2018) Sekretaris Satpol PP (Oktober-November 2018)

			Kepala dinas Kantor perpustakaan dan arsip Daerah (January 2019 hingga saat ini)
5	Nurdin Ganni ST.MT.	Sekretaris Dinas perpustakaan dan arsip daerah (December 2018)	Kepala Dinas Satpoll PP Kabupaten Boalemo. (Januari-April 2019) sekretaris Dinas Transmigrasi dan ketenagakerjaan (Mei- juni 2019) kepala dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. (Agustus 2019 hingga saat ini)
6	Sofyan Hassan	Kepala dinas Pertanian PLT Sekda	korupsi pembangunan irigasi Air Dangkal.
7	Hussain Etango	Sekretaris Daerah	Nonjob (1 tahun 10 bulan)

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dalam Kamuli (2020:87)

Temuan Kamuli (2020) tersebut tersirat dengan jelas bahwa promosi dan penunjukan jabatan karier dalam kurun waktu 2019 bertentangan dengan regulasi. Selain dari kompetensi dan kebutuhan organisasi dan lain sebagainya, rentang waktu yang mengatur masalah tersebut dilanggar. Hampir semua promosi dan penunjukan jabatan karir bertentangan dengan regulasi. Pasal 2 dan 3 PP 58 Tahun 2019 yang menitikberatkan pada konflik kepentingan dan politisasi birokrasi.

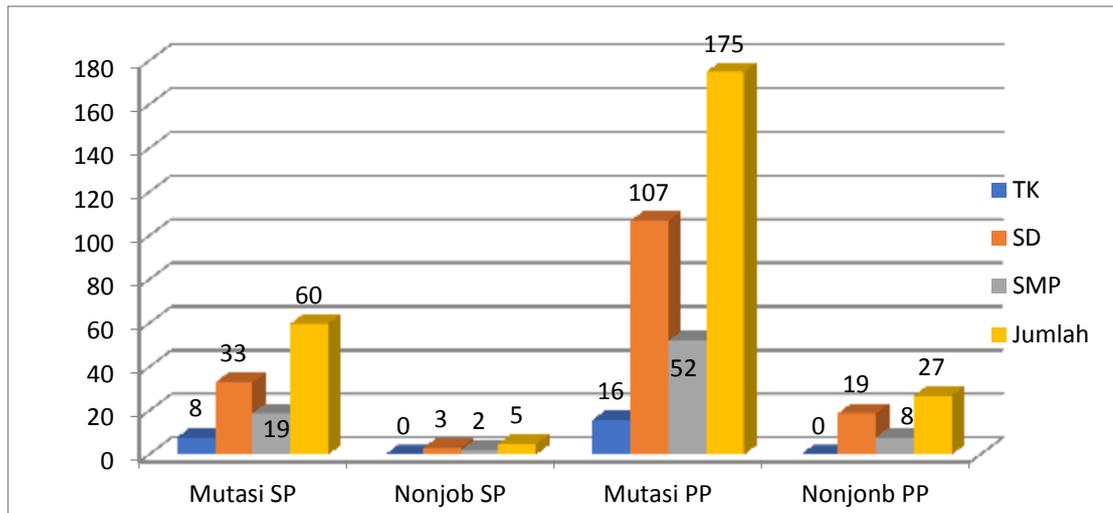
Berangkat dari teori, temuan penelitian dan regulasi tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa politisasi birokrasi melalui promosi atau penunjukan jabatan karir di Kabupaten Boalemo merupakan salah satu faktor yang menentukan perilaku birokrasi dalam Pemilu. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa promosi dan penunjukan jabatan karir menjelang Pemilu bertentangan dengan regulasi yang ada. Harusnya, promosi atau penunjukan jabatan karir dilakukan

berdasarkan pada aspek kebutuhan administrasi pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan ketentuan atas regulasi yang ada. Namun, kebijakan atas promosi atau penunjukan jabatan karir lebih mengedepankan aspek subjektif kepala daerah tanpa memperhatikan regulasi yang ada.

Atas hal tersebut, apa yang dikemukakan oleh Edward & Berenschot (2019) tentang keterlibatan birokrasi yang dimotori oleh kepentingan praktis menjadi jelas dalam fenomena perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Ketentuan atas temuan tersebut juga menjadi kenyataan atas apa yang dikemukakan oleh Thoha (2002:185), karakteristik birokrasi yang memiliki hirarki, wewenang dan sistem kontrol sebagai bagian dari perilaku birokrasi menjadi faktor penentu bagi birokrasi dalam menentukan pilihan politik.

Dengan karakteristik tersebut menunjukkan asas ketaatan dan kepatuhan ASN terhadap atasan. Karena hirarki, keputusan ASN lebih mengedepankan unsur ketaatan dan kepatuhan atas perintah atasan. Berdalil pada kewenangan yang menguasai struktur birokrasi maupun sumber daya pemerintah daerah membuat ASN mudah untuk dipolitisir. Selain itu, sistem kontrol yang disalahgunakan membuat ASN akan berpihak terhadap calon dan partai PDIP pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.

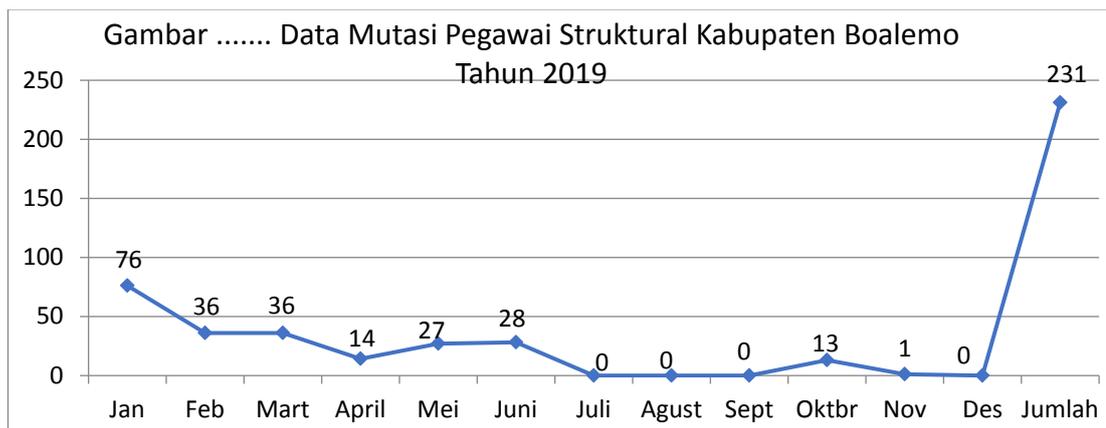
Gambar Mutasi dan Pencopotan Jabatan Karir Pegawai Fungsional Guru



Ket. SP= Sebelum Pemilu. PP= Pasca Pemilu

Sumber : Data diolah berdasarkan kearsipan Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo 2020

Data pada gambar tersebut menunjukkan bahwa intensitas mutasi dan pencopotan jabatan karir bagi pegawai fungsional guru sebelum Pemilu berjumlah 60 orang dan 5 orang yang dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Angka ini kemudian meningkat pesat setelah pasca Pemilu 2019, sekitar 175 orang pegawai fungsional yang dimutasi terdiri dari guru SD 107 orang, SMP 52 orang dan guru TK sebanyak 16 orang. Pencopotan jabatan karir dalam hal ini jabatan fungsional kepala sekolah mengalami peningkatan, signifikan dengan jumlah 27 orang yang terdiri dari kepala sekolah SD 19 orang dan SMP berjumlah 8 orang. Selain tenaga atau pegawai fungsional, kondisi tersebut juga terjadi pada tenaga struktural seperti apa yang disajikan pada gambar berikut ini :



Sumber : BKD 2019 dalam Kamuli (2020:72)

Data dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 231 mutasi yang terjadi pada jajaran struktural di Kabupaten Boalemo. Data tertinggi mutasi terjadi pada awal tahun 2019, yakni pada bulan Januari berkisar 76 mutasi, kemudian pada bulan Februari dan Maret sebanyak 36 mutasi. Bulan April sebanyak 14 mutasi dan pada bulan Mei hingga Juni berkisar rata-rata 27 kali mutasi. Selain itu, pada bulan Juli, Agustus, September tidak ada mutasi, sementara pada bulan Oktober sebanyak 13 kali mutasi dan November 1 mutasi.

Jika dilihat, kebanyakan mutasi bagi pegawai struktural terjadi pada tahapan pelaksanaan Pemilu di antara bulan Januari-April 2021 dan pasca Pemilu dari bulan Mei-Juni sebanyak 55 mutasi. Hal ini berbeda dengan mutasi dan nonjob bagi pegawai fungsional pasca Pemilu sekitar 175 dan pencopotan dari jabatan kepala sekolah berjumlah 27 orang. Artinya, data tersebut sinkron dengan temuan penelitian bahwa sebagian besar ASN yang dimutasi atau dicopot dari jabatan sebelumnya karena terindikasi tidak mampu menjalankan amanah dan arahan kepala daerah serta dicurigai mendukung calon dari partai lain.

Atas hal tersebut, dapat dipastikan bahwa mutasi dan pencopotan jabatan karir pada tahapan pelaksanaan maupun pasca Pemilu sangat berkaitan erat dengan dukungan ASN terhadap partai PDIP di Kabupaten Boalemo. Bagi pejabat

struktural maupun fungsional serta ASN secara keseluruhan akan memilih untuk mempertahankan dirinya ketika diperhadapkan pada persoalan ini. Untuk mempertahankan jabatan atau tempat kerja dan atau tugas, tidak ada pilihan lain selain mengikuti himbauan arahan kepala daerah. Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi sebahagian besar ASN dalam memberikan dukungan dan pilihan politik dalam memilih calon anggota DPRD dari partai PDIP. Temuan tersebut berhubungan erat dengan pembahasan sebelumnya, dimana sebahagian besar ASN dalam menggunakan hak politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, kesimpulan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Terdapat kecenderungan perilaku rasional birokrasi bagi birokrasi yang berada dalam jajaran fungsional kesehatan. Preferensi politiknya berdasarkan pada pertimbangan logis dan konsisten terhadap kebutuhan akan isu, visi-misi dan program kerja baik calon maupun partai politik mengenai Kesehatan. Birokrasi yang berada di jajaran fungsional Kesehatan tidak mempertimbangkan keberadaan kepala daerah sebagai petahana serta pengaruh dari pihak lain. Keputusan politik berdasarkan pada preferensi individu atas kebutuhan, lebih berorientasi kerja terhadap tugas bila dibandingkan dengan preferensi lainnya.
- b. Terdapat tiga faktor yang menghambat perilaku rasional politik birokrasi dalam Pemilu, diantaranya adalah faktor ikatan kekeluargaan dan kerabat dekat antara birokrat dengan calon dari partai politik maupun ikatan keluarga dengan ASN yang mendukung partai petahana. Faktor peran kepala daerah sebagai petahana sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sangat berpengaruh terhadap netralitas dan perilaku politik rasional birokrasi. Faktor yang terakhir adalah pertimbangan jabatan karir, dimana birokrat lebih cenderung mengemankan kepentingan pribadi atas karirnya sebagai ASN untuk dipromosi dalam jenjang karir yang lebih tinggi lewat sikap pamrih terhadap kepala daerah melalui Pemilu.

5.2. Saran

Berangkat dari kesimpulan penelitian di atas maka Adapun yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini mencakup :

- a. Perlu adanya peranan dan penguatan pendidikan politik bagi birokrat di daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun pemerintah daerah agar perilaku rasional politik birokrasi dapat tercapai pada setiap Pemilu.
- b. Perlu adanya penguatan kelembagaan ASN di tingkat Provinsi agar dapat mengontor dengan mudah pelanggaran netralitas ASN dalam setiap Pemilu
- c. Perlu adanya peninjauan Kembali kepala daerah sebagai pejabat PPK, ditangguhkan atau diintegrasikand dengan kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri agar netralitas birokrasi dalam setiap Pemilu dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antunes, Rui. "*Theoretical models of voting behaviour*". *Exedra* 4 (2010) : 145-170. Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Coimbra. Published <http://exedra.esec.pt/docs/N4/10C>
- Ardana, Mujiati, Sarathi. 2009. *Perilaku Keorganisasian Edisi 2* . Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 1987. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta
- Diana Bambang Agus, 2020. Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah. Volume 2. No. (1)*
- Edward Aspinall, Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Firnas M. Adian, 2011a. Evaluasi Reformasi Birokrasi : Masalah Politisasi Birokrasi Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 5, No.(2)*
- Gitosudarmo, Sudita, (2016). *Perilaku keorganisasian*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta
- Halaevy Etzioni 2011, *Demokrasi & Birokrasi Sebuah Dilema Politik*, Yogyakarta, Matapena Istititut
- Harrison Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana prenada Media Group.
- Huberman & Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Jones, Bradbury, Bputtiler. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lay Cornelis, 1998. *Birokrasi Indonesia. Perspektif Pemerintahan*, JIP FISIPOL UGM
- Lofland, John & Lyn.H.Lofland. (1984). *Analyzing Social Settings*. California: Wadsworth Publishing Company Moleong Lexy 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mudiarta Untung 2018. Politisasi Pelayanan Publik Perspektif Komparatif Beberapa Negara (Mencari Cara Mengontrol Birokrasi) *Jurnal Politik & Pemerintahan - Vol.2, No.2, Desember 2018*

- Rakhmawanto. 2017. Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* Vol. III Nomor (1)
- Robbins Stephen, Judge, 2015. Perilaku organisasi, *organization behavior*. Salemba Empat.
- Sarnawa Bagus, 2018. Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 25 No(.2)
- Suryanjar Enny, Catatan Kritis Terhadap Politisasi Birokrasi Dalam Pemilu. E-Jurnal BKN Vol No 1 Juni (2009)
- Thoha Miftah, 2019. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Edisi ke-25
- Wahyudi Lutfi. Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung *Jurnal Paradigma*, Vol. 7 No. 3, Desember 2018

Lampiran 1 Lampiran 4: Biodata Pengusul

KETUA TIM

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Asmun W Wantu, S.Pd.,M.Sc
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	197807122005012004
5	NIDN	001207803
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Limehe Barat 12 Juli 1978
7	E-mail	
8	Nomor Telepon / HP	(0435) 834829 /081328615360
9	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon / Fax	0435 827038, Fax 0435 827038
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 70 Orang, S2=.... Orang, S3=... Orang
12. Mata Kuliah Yang Diampu		1. Belajar Dan Pembelajaran
		2. Pendidikan Kewarganegaraan
		3. Ilmu Kewarganegaraan
		4. Kurikulum Dan Buku Teks PPkn
		5. Perkembangan Peserta Didik

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	*Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	*Pendidikan Kewarganegaraan	Ketahanan Nasional	
Tahun Masuk – Lulus			
Judul Skripsi/Te sis/Disert asi	*Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui metode Diskusi	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendatang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	
Nama Pembimbi	1. Drs. Revoltje O.W Kaunang MPd	1.Prof Dr Kodiran 2. Dr Ahmad Zubaidi MSc	

ng/Promotor	2. Fenty Puluhulawa, SH M.Hum		
-------------	----------------------------------	--	--

C. PENGALAMAN PELATIHAN/SEMINAR

No.	JUDUL KEGIATAN	TAHUN	PENYELENGARA
1.	Saresehan Nasional	2011	Mahkamah Konstitusi
2.	Dialog Budaya	2011	Kementrian Kebudayaan dan Parawisata
3.	Peningkatan SDM dalam mengembangkan Potensi Unggulan	2005	UNG
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	2006	UNG
5.	Evaluasi Pelaksanaan KTSP	2006	UNG
6.	Sarasehan Nasional “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia”	2010	Jogjakarta
7.	Focus Group Discussion (FGD) “Konsepsi Pelebagaan perancangan dan advokasi hubungan pusat dan daerah menuju pembentukan pusat studi kebijakan dan informasi hukum pusat daerah di Provinsi Gorontalo”	2011	Gorontalo
8	Dialog budaya “membangun generasi terbaik dan peradaban nilai menuju daya saing bangsa	2011	Manado
9	Seminar Nasional “Tranformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan	2012	UPI Bandung
10	Lokakarya Pengembangan akreditasi program studi Perguruan Tinggi di UNG	2012	Gorontalo
11	Seminar Nasional “Pencegahan Perilaku Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural	2013	Gorontalo

12	Seminar Nasional BPK, pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat	2015	Gorontalo
----	--	------	-----------

D. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	SUMBER DANA/PENYELENGARA
1.	Upaya meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta didik melalui metode diskusi (Penelitian Tindakan Kelas di MTs Negeri Batudaa)	2006	PNBP
2.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007	PNBP
3.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008	PNBP
4.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009	PNBP
5.	Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Prospektif Kapasiti Building (Studi di Kab. Bone Bolango)	2011	PNBP
6	Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	2018	APBD Kabupaten Boalemo

E. Pengalaman menulis jurnal/artikel

No.	JUDUL Artikel	TAHUN
1.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007

2.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008
3.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009
4.	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendatang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	2010

F. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jmlh (Juta Rp)
1	2015	Pemateri pada kegiatan dialog pendidikan “Menjadi pemuda atriotism”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
2	2015	Instruktur pada pelatihan pembinaan karakter “Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak Qul-Karima”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
3	2014	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
4	2014	Instruktur PLPG rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo	UNG	450.000
5	2013	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
6	2013	Pembimbing KKS Mahasiswa Prodi PPKn	LPM-UNG	2.500.000
7	2018	Pendidikan Politik Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo	PNBP FIS UNG	5.000.000

G. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, Asosiasi atau Institusi

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Keterangan / Tahun
1	Pelatihan Keterampilan Instruksional Teknis (Pekerti) dan Applied Approach	Universitas Negeri Gorontalo	2010

	(AA)		
2	Pelatihan pembelajaran aktif di perguruan tinggi (Active learning in Higher-Education-ALIHE)	Universitas Negeri Gorontalo	2010
3	Rapat kerja Asosiasi Profesi PPKn Indonesia	UPI Bandung	2012
4	Memperoleh sertifikat pendidik dosen profesional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Mandiri Tahun 2020.

Gorontalo, September 2021

Yang Membuat Pernyataan

Asmun W. Wantu S.Pd., M.Sc
NIP. 19780712 200501 2 004

A. Identitas Diri Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ramli Mahmud, S.Pd, M.A
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198205032015041002
5	NIDN	0903058201
6	Tempat dan Tanggal lahir	Tidore, 3 Mei 1982
7	E- mail	ramlimahmud33@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	082189200922
9	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo
10	Mata kuliah yang diampu	1. Politik Lokal
		2. Ilmu Politik
		3. Teori Politik
		4. Sistem Politik Indonesia
		5. Kapita Selekta Ilmu Politik
		6. Pemilu Dan Sistem Kepartaian
		7. Etika Politik
		8. Otonomi Daerah

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Mafututu Kota Tidore Kepulauan Tahun 1992
- SMP Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan Tahun 1998
- SMA PGRI Kota Tidore Kepulauan Tahun Lulus 2001
- S1 PPKn UNG Tahun 2007
- S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Tahun 2010
- S3 Administrasi Publik UNG Tahun 2022

B. PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020	Penguatan Demokrasi Lokal "Studi Orientasi Budaya	Anggota	PNBP FIS	Jurnal

	Politik Masyarakat Pesisir di Kecamatan Dulupi”			
2018	Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupataen Boalemo	Ketua	APBD Kabupaten Boalemo	Laporan dan Rekomendasi
2018	Orientasi Budaya Politik Perempuan ”Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada Pemilu 2019”	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2017	Reformasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Gorontalo	Anggota	PNBP FIS	Jurnal
2017	Survei Opini Publik Kecenderungan Peralihan Pilihan Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Gorontalo	Ketua	Partai Politik	Laporan dan Rekomendasi
2016	Orientasi Perilaku Politik Pemula Pada Pemilihan Gubernur Gorontalo Tahun 2017 di Kota Gorontalo	Anggota	PNBP FIS	Jurnal

C. KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2021	Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Di Sma Negeri 1 Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Jambura Journal Civic Education

2020	<i>Strengthening Local Democracy (Orientation Study of Political Culture of Coastal Communities in Dulupi District, Boalemo Regency)</i>	<i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</i>
2019	<i>Struggle of the Local Elite in Gorontalo</i>	<i>International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding</i>
2019	Orientasi Budaya Politik Perempuan ”Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada Pemilu 2019”	Jurnal Politico Unsrat Manado
2020	Politisasi Birokrasi (<i>Studi Netralitas Birokrasi Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo</i>)	Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo
2017	Orientasi Budaya Politik Pemilih Pemula	Jurnal Legalitas
2021	Perspektif Perilaku Sosiologis Birokrasi Dalam Pemilu (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo)	Jurnal Politico Unsrat Manado
2022	Internalization of Salbia Value in Strengthening Bureaucratic Neutrality during Election in Gorontalo Province	Review Of International Geographical Education

D. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
2020	Wibiner nasional Dilema Pilkada Di Tengah Covid-19	Prodi PPKN FIS UNG	Narasumber
2020	Pilkada dan Keselamatan Pemilih	IKA-PMII Provinsi Gorontalo	Narasumber
2018	Pendidikan Politik Generasi Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo	FIS UNG	Narasumber
2018	Pola Rekrutmen Bacaleg Anggota Legislatif	DPW PPP Provinsi Gorontalo	Narasumber
2018	Cara Mempengaruhi Perilaku Politik Pada Pemilu 2019	DPW PPP Provinsi Gorontalo	Narasumber

2017	Dialog Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Torosiaje	Mapala Butaiyo Nusa FIS UNG	Narasumber
2017	Dialog PKN Peduli Lingkungan Di Desa Botutonuo	HMJ PPKN FIS UNG	Narasumber
2016	LDK mahasiswa paguyuban HIPMI-Malut Gorontalo	HIPMI-MALUT Gorontalo	Narasumber

E. KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020	Penguatan Kelembagaan Desa Bongkudai Barat	Ketua	Mandiri	Jurnal
2019	Pendidikan Karakter Bangsa bagi siswa SMA di Kecamatan Dulupi	Anggota	PNBP FIS	-
2018	Pendidikan Politik Generasi Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo	Anggota	PNBP FIS	-
2019	Tim Penyusunan Naskah Akadmeik Ranperda Peralihan Kantor kesbangpol dan Linmas Menjadi Badan Kesbangpol Kabupaten Boalemo	Anggota	APBD Kabupaten Boalemo	Perda
2021	Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Aset Daerah Provinsi Gorontalo	Anggota	Bidang Aset Daerah	Perda
2021	Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda Indsutri Kabupaten Boalemo	Anggota	Perindakop Boalemo	Perda

F. ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/ Jenjang
-------	------------------------	------------------

2020- skrng	Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo	Sekretaris Wilayah
2006- skrng	Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Wilayah Gorontalo	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Gorontalo.... April 2022

Yang Menyatakan,



Ramli Mahmud, S.Pd,M.A

A. Identitas Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rasid Yunus, S.Pd, M.Pd
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	198402242008121003
5	NIDN	0024028401
6	Tempat dan Tanggal lahir	Lomuli 24 Februari 1984
7	E- mail	rasidyunus@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	085394300094
9	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No.6 Kota Gorontalo
10	Mata kuliah yang diampu	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Ilmu Kewarganegaraan 3. Dasar-Dasar Pendidikan Moral 4. Pengantar Ilmu Pendidikan 5. Sosiologi Pendidikan 6. Pendidikan Pancasila 7. Profesi Kependidikan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	
Bidang Ilmu	Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Kewarganegaraan	
Tahun Masuk-Lulus	2004-2008	2011-2013	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi intra kampus dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik di Universitas Negeri Gorontalo	Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa (Studi kasus budaya Huyula di Kota Gorontalo)	
Nama Pembimbing/Promotor	1. Dr. Jusdin Puluwulwa, M.Si 2. Dr. Sukarman Kamuli, M.Si	1. Prof. Dr. Sapriya, M.Ed 2. Prof. Dr. Dadang Supardan, M.Pd	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

1	2015	Evaluasi Program Audit Mutu Pembelajaran di UNG	PNBP-UNG	22.000.000
2	2016	Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kota Gorontalo	PNBP-FIS PNBP-FIS	10.000.000
3	2018	Orientasi Budaya Politik Perempuan (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG pada Pemilihan Umum Tahun 2019	PNBP-FIS	10.000.000
4	2019	Efektivitas Pembinaan Kerohanian Islam Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo	Mandiri	10.000.000
5	2020	Membangun Karakter Suku Bangsa dalam Perspektif Identitas Etnik (Studi Kasus Di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato)	PNBP-FIS	25.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
5	2015	Instruktur PLPG rayon 128 UNG	Kemendiknas	2.500.000
6	2016	Pemateri pada Seminar Pembinaan Alumni Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Kementerian Pertahanan di Gorontalo	Kementerian Pertahanan RI	2.500.000
7	2016	Instruktur PLPG rayon 128 UNG	Kemendiknas	2.500.000
8	2017	Instruktur PLPG sub rayon 128 UNG	Kemendiknas	3.000.000
	2018	KKS Tematik Destana "Peran Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Tutulo	PNBP-UNG	25.000.000

		Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo”		
10	2019	Pembinaan Karakter Pada Siswa SMA Neg. 1 Dulupi Kab. Boalemo Gorontalo	PNBP-FIS	5.000.000
11	2020	Penguatan Kelembagaan Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modaya Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara	Mandiri	2.500.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
1	Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus Budaya Huyula Di Kota Gorontalo	Jurnal Penelitian Pendidikan ISSN 1412-565X LPPM UPI Bandung	April 2013, Bandung
2	Redesain Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Media Pembentukan Karakter	Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya (Cultura) Volume 1 Nomor 1	Juni 2015, Universitas Negeri Gorontalo
3	Membangun Karakter Suku Bajo dalam Perspektif Identitas Etnik	Journal Of Government and Political Studies Volume 4 No.1	April 2021, Universitas Gorontalo
4	Realizing Multikulturalism and Social Integration In Banuroja Community	Jurnal Civics: Media Kajian Kewaganegaraan Vol.18 No.1	April 2021, In Association With AP3Knl

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Pembinaan Alumni Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Kementerian Pertahanan di Gorontalo	Bela Negara dalam Konteks Akademisi	Mei 2016, Gorontalo

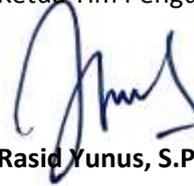
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Empiris tentang Huyula)	2014	200	Deepublish, Yogyakarta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pengabdian masyarakat biaya mandiri tahun 2021.

Gorontalo,.....September 2021

Ketua Tim Pengusul



Rasid Yunus, S.Pd.,M.Pd

Curriculum Vitae

Nama : Yuli Adhani, S.Pd, M.Pd
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jeruk Perumahan Civica Blok A No. 17
Kelurahan Wumialo
Kecamatan Kota Tengah
Gorontalo
Telepon/Hp : 082399333400
Email : uwais.asiyah@gmail.com

Pendidikan

1994-1999 SD Muhammadiyah 2 Jakarta Pusat
1999-2002 SLTP Negeri 2 Jakarta Pusat
2002-2005 SMA Negeri 27 Jakarta Pusat
2005-2009 Universitas Negeri Jakarta
Fakultas Ilmu Sosial
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
(IPK : 3.81/ Cum Laude)
2010-2012 Universitas Pendidikan Indonesia
Sekolah Pascasarjana Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan (S2)
(IPK : 3,81/Cum Laude)

Pengalaman

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Bidang Research And Education Universitas Negeri Jakarta Periode 2006-2007
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Periode 2007-2008
3. Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode 2010-2012

Seminar yang diikuti

1. Peserta Seminar Nasional “Aktualisasi Pendidikan Karakter Bangsa” Program Pascasarjana (15 November 2010)
2. Peserta Seminar Nasional “Gerakan Membangun Karakter Bangsa” Universitas Negeri Jakarta (4 Desember 2010)
3. Peserta Seminar Nasional “PKn Untuk Tujuan Khusus” Universitas Pendidikan Indonesia (21-22 Juni 2011)
4. Peserta workshop “otonomi pendidikan tentang prospek otonomi pendidikan bidang pembagian urusa pemerintahan dan alokasi anggaran pendidikan” LPPM Universitas Pendidikan Indonesia (28 November 2011)
5. Peserta seminar perkembangan pendidikan nilai dan kewarganegaraan Malaysia-Indonesia Universiti Sains Malaysia (17 Januari 2012)
6. Pemateri Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) : Desain pembelajaran berbasis karakter di sekolah” Forum Komunikasi Mahasiswa sekolah pascasarjana (27 Maret 2012)
7. Pemakalah seminar nasional “transformasi empat pilar kebangsaan dalam mengatasi fenomena konflik dan kekerasan : Peran PKn” pascasarjana universitas pendidikan Indonesia (31 Maret 2012)

Pengalaman Profesional

1. Dosen Tidak Tetap Akademi Telekomunikasi Shandy Putra Jakarta (2012-2019)
2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Budi Agung Jakarta Utara (2009-2010)
3. Dosen Honorer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012-2014)
4. Dosen Honorer Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (2012-2014)
5. Dosen honorer Universitas Esa Unggul Jakarta (2012-2014)
6. Dosen Honorer Universitas Negeri Jakarta (2012-2015)
7. Turor Universitas Terbuka Jakarta (2012-2015)
8. Dosen Honorer Akademi Keperawatan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta (2015-2015)

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Gorontalo, September 2021



Yuli Adhani, S.Pd, M.Pd
Nip. 198707022020122011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : /UN47.B2.6/KM.00.00/2022

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Al Amin Sabri
NIM : 221418063
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan/Prodi : S1- IHK/ PPKn
Angkatan : 2018/2019

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa aktif Semester Genap tahun akademik 2021/2022 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya, berlaku sampai dengan **30 Juni 2022**.

Gorontalo, 23 Mei 2022
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni

Saintijin Latare, S.Pd. M.Si
NIP. 197508102002121002

Tembusan Yth,

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : /UN47.B2.6/KM.00.00/2022

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Noldiyanto Huo
NIM : 221418063
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan/Prodi : S1- IHK/ PPKn
Angkatan : 2018/2019

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa aktif Semester Genap tahun akademik 2021/2022 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya, berlaku sampai dengan 30 Juni 2022.

Gorontalo, 23 Mei 2022
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni

Saifuddin Latare, S.Pd. M.Si
NIP. 197508102002121002

Tembusan Yth,
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : /UN47.B2.6/KM.00.00/2022

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Febriyanto Hasyim
NIM : 221418016
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan/Prodi : S1- IHK/ PPKn
Angkatan : 2018/2019

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa aktif Semester Genap tahun akademik 2021/2022 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya, berlaku sampai dengan **30 Juni 2022**.

Gorontalo, 23 Mei 2022
Wakil Dekan-Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni

Sainudin Latore, S.Pd. M.Si
NIP. 197508102002121002

Tembusan Yth,
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan
3. Arsip

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Husain Etango Mantan Sekda Boalemo



Wawancara dengan Bapak Serman Moridu sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekarang sebagai Sekda Boalemo



Wawancara dengan Bapak Agus Nahu sebagai mantan Kepala BKD Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Ruslin Limalo mantan Kepala Kepala Kesbangpol Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Eka Putra Noho Ketua DPRD
Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Harijanto Mamangkey Ketua Fraksi PDIP
Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Herman D. Laima Camat Dulupi



Wawancara dengan Ibu Amelia Kadji Kepala Puskesmas
Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Ibu Sofiyanti Talino
Kabid Pelayanan RSTN Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Koharudin
Tenaga Kesehatan RSTN Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Haris Laingo
Staf Khusus Bupati Bidang Pemilu



Wawancara dengan Bapak Amir Thalib selaku Staf
Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Sumitro Ulitoto mantan kepala sekolah dan staf dinas pendidikan Kabupaten Boalemo



Wawancara dengan Bapak Rustam Kadir Kepala Sekolah SMP 1 Paguyaman Kabupaten Boalemo